



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

TAHUN 2018



Pemerintah Kota Balikpapan
Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Kota Balikpapan tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja Kota Balikpapan 2018 yang diukur berdasarkan capaian indikator sasaran Wali Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan atas penggalan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tahun 2018.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, Wali Kota Balikpapan menetapkan 10 sasaran dan 20 indikator kinerja (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh program prioritas dan program penunjang tahun 2018.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap indikator kinerja (IKU) Kota Balikpapan tahun 2018 per sasaran strategisnya, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Kota Balikpapan tahun 2018 dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**" pada tahun 2018 sebesar 101,60% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dengan realisasi 10,58 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 14,23 Tahun. Berdasarkan capaian 2 (dua) IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
2. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan**" pada tahun 2018 sebesar 100,01% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup. dengan realisasi 73,98 Tahun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
3. Capaian Sasaran Strategis "**Menurunnya Jumlah Pengangguran**" pada tahun 2018 sebesar 78,35% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 9,25% dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi 64,33%. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TIDAK TERCAPAI**" karena kurang dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Pengangguran.
4. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan**" pada tahun 2018 sebesar 96,04% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 79,71, Tingkat Kemiskinan dengan realisasi 2,82 dan Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi 89,74. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TIDAK TERCAPAI**" karena kurang

dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan dan IKU Indeks Pembangunan Gender.

5. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**" pada tahun 2018 sebesar 100,13% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi 59,58. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
6. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan**" pada tahun 2018 sebesar 111,37% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) *Livable City Index* dengan realisasi 81,30. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
7. Capaian Sasaran Strategis "**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal**" pada tahun 2018 sebesar 105,72% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar dengan realisasi 83,35. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
8. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**" pada tahun 2018 sebesar 102,88% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Gini Ratio dengan realisasi 0,31 dan PDRB Perkapita dengan realisasi Rp. 142.35 Juta. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan pada IKU PDRB Perkapita yang kurang memenuhi capaian target.
9. Capaian Sasaran Strategis "**Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**" pada tahun 2018 sebesar 100% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Non Migas dengan realisasi Rp. 67,46 Triliun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena target yang diperjanjikan sesuai dengan capaian realisasi.
10. Capaian Sasaran Strategis "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**" pada tahun 2018 sebesar 106,62% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Laporan Keuangan dengan realisasi WTP (diasumsikan tercapai), Indeks Persepsi Korupsi dengan realisasi 6,87, Survey Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 78,78, Nilai Evaluasi LAKIP dengan realisasi 68,13 (B), Penilaian Kepatuhan dengan realisasi 83,19 dan Indeks Profesionalitas ASN dengan realisasi 92,58. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan capaian pada IKU Survey Kepuasan Masyarakat yang kurang memenuhi capaian target.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan tahun 2018. LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 menyajikan gambaran informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Walikota Balikpapan tahun 2018.

LKjIP tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018. Pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Balikpapan 26 Maret 2019



DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LANDASAN HUKUM.....	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
C. DATA ORGANISASI.....	10
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
B. REALISASI ANGGARAN.....	98
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	101
BAB IV PENUTUP.....	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan	19
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2018	22
Tabel 2.3.	Program dan Anggaran yang Mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2018	23
Tabel 3.1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018	33
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.....	37
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	66
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Realisasi IKU Tahun 2018 Terhadap Target IKU RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan.....	90
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2018	98
Tabel 3.5	Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018	99
Tabel 3.6	Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	99
Tabel 3.7	Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2016-2021.....	100
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018	100
Tabel 3.9	Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	100
Tabel 3.10.	Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan	101
	Tahun 2018	
Tabel 4.1.	Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2018	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Huruf Tahun 2018	40
Gambar 3.2.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018.....	41
Gambar 3.3.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapa Hidup Tahun 2018	42
Gambar 3.4.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Tingkat Pengganguran Terbuka Tahun 2018	43
Gambar 3.5.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018	45
Gambar 3.6.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018	46
Gambar 3.7.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2018.....	48
Gambar 3.8.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018	49
Gambar 3.9.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018	51
Gambar 3.10.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU <i>Livable City Index</i> Tahun 2018.....	52
Gambar 3.11.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indek Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Tahun 2018	53
Gambar 3.12.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Gini Ratio Tahun 2018.....	55
Gambar 3.13.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai PDRB Perkapita Tahun 2018.....	56
Gambar 3.14.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU PDRB Perkapita Tahun 2018.....	58
Gambar 3.15.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2018	59
Gambar 3.16.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018.....	60
Gambar 3.17.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	61
Gambar 3.18.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2018.....	62
Gambar 3.19.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penilaian Kepatuhan Tahun 2018.....	63
Gambar 3.20.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN terhadap kebersihan dan Keindahan kota Tahun 2018.....	65

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2018, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan komitmen dan janji yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun tahun 2016-2021 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2018

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2018 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2018 adalah kurang lebih sama dengan LKjIP tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan periode 2016-2021.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 dan ;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012-2016 (5 tahun) dengan target kinerja 2016-2021 (5 tahun) yang direncanakan (RPJMD Kota Balikpapan).

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DATA ORGANISASI

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur susunan perangkat daerah Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - 4. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
 - 9. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 13. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;

14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
15. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
17. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan yang terdiri atas:

1. Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
2. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;
3. Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
4. Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan tahun 2018, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;
2. Membandingkan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 sampai dengan 2018 (2 tahun) dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kab/kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (yang ada) dan realisasi tingkat nasional (yang ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Walikota Tentang Indikator Kinerja Utama
4. Hasil Reviu Inspektorat Kota Balikpapan Terhadap LKjIP tahun 2018
5. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021
6. Prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Balikpapan Tahun 2018.
7. Foto-foto kegiatan peningkatan kualitas dokumen SAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* terkait Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021 dan merupakan pertama kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2016-2021.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2018.

1. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN

Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

a. **KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

b. **KOTA NYAMAN DIHUNI** (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;

4. Keamanan, bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c. **KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

d. **MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan Visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021, sebagai berikut :

MISI 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi	
Tujuan Ke-1	: Mewujudkan sumber daya yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing tinggi
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
Tujuan Ke-2	: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara keseluruhan
Sasaran	: 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan.
Tujuan Ke-3	: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
Sasaran	: 3. Menurunnya jumlah pengangguran; 4. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

MISI 2 Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan.
Sasaran	: 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 6. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan.

MISI 3 Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif	
Tujuan Ke-5	: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur.
Sasaran	: 7. Terwujudnya infrastruktur yang handal;

MISI 4 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif	
Tujuan Ke-6	: Menggerakkan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat.
Sasaran	: 8. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
Tujuan Ke-7	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau.
Sasaran	: 9. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

MISI 5**Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tujuan Ke-8 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penyediaan Layanan Publik yang Prima

Sasaran : 10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan, RSUD Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Dinas Tenaga Kerja
		2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

		2.	Tingkat Kemiskinan (persen)	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.	Indeks Pembangunan Gender (indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i> (indeks)	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan penataan Ruang
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio (indeks)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		2.	PDRB perkapita (persen)	Bappeda Litbang
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB non migas (persen)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini laporan keuangan (Kategori)	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan pengelolaan Pajak Daerah

				dan Retribusi Daerah
		2.	Indeks Persepsi Korupsi (indeks)	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (indeks SKM)	Bappeda Litbang
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (skor Kinerja)	Bappeda Litbang
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6.	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

Sumber : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Walikota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transpa-ransi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/-kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 kepada Menteri PAN dan RB disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.47
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73.97
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.30
		2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63.68
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. IPM	78.73
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	2.33
		3. Indeks Pembangunan Gender	91.00
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.50
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. <i>Livable City Index</i>	73.00
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	76.00
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Indeks Gini Ratio	0.33
		2. PDRB perkapita (Rp. Juta)	143.33
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB non migas (Rp. Triliun)	67.46
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP

2.	Indeks Persepsi Korupsi	6.70
3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	79.76
4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	B (69-71)
5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	65.00
6.	Indeks Profesionalitas ASN	84.00

Sumber : Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut di atas, target capaian IKU akan didukung oleh program dan anggaran tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Salinan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB tahun 2018 disajikan dalam lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.3. Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2018

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	1.01.06.1.01.06.01.23.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	115,000,000
2	1.02.05.1.02.05.01.16.022.	Pemantapan Program Adiwiyata	98,500,000
3	1.01.02.1.01.02.00.35.	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	5,651,963,000
4	1.01.06.1.01.06.01.22.002.	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	1,013,975,800
5	1.01.03.1.01.03.01.36.	Peningkatan Drainase Lingkungan	18,051,485,000
6	1.01.03.1.01.03.01.35.	Peningkatan Jalan Lingkungan	70,605,621,000
7	1.01.02.1.01.02.00.33.002.	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	148,480,000
8	1.02.10.1.02.10.10.19.	Penyebarluasan Informasi Daerah	917,000,000
9	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	866,672,400
10	1.02.05.1.02.05.01.16.027.	Program CGH (Clean, Green an Healthy City)	198,500,000
11	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	146,895,000
12	1.01.03.4.00.01.01.69.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	354,945,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
13	1.01.02.6.00.01.01.37.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	264,025,000
14	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	2,800,000,000
15	1.02.08.1.02.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	2,820,066,350
16	5.00.01.5.00.01.01.23.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	170,000,000
17	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	440,000,000
18	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	814,023,000
19	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	516,450,000
20	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	14,887,200,000
21	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	6,935,102,500
22	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134,444,325,300
23	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	330,000,000
24	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1,577,914,650
25	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	141,200,000
26	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,073,790,000
27	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	50,550,000,000
28	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	10,000,000,000
29	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	36,400,350,000
30	1.02.09.1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	400,000,000
31	2.00.01.2.00.03.01.33.	Program Pembangunan/Peningkatan/Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	6,000,000,000
32	1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	488,416,000
33	2.00.03.2.00.03.01.32.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	242,100,000
34	5.00.01.1.01.05.02.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2,476,200,000
35	2.00.03.2.00.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	411,496,000
36	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	11,759,522,250
37	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	105,000,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
38	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,402,140,000
39	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	100,000,000
40	1.02.08.6.00.01.06.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	247,000,000
41	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,502,500,000
42	5.00.01.1.01.05.02.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2,855,120,000
43	1.02.09.1.02.09.01.29.	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-
44	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	70,000,000
45	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	13,677,910,000
46	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	950,000,000
47	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	423,000,000
48	1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1,331,225,800
49	1.01.04.1.01.04.01.29.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1,528,000,000
50	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,145,821,600
51	4.00.01.4.00.01.01.42.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	181,500,000
52	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	611,725,000
53	1.02.04.1.01.01.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	20,630,802,650
54	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,192,160,000
55	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	12,724,000,000
56	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,808,828,000
57	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	-
58	2.00.03.2.00.03.01.28.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	395,020,000
59	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	50,000,000
60	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,023,000,000
61	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	178,529,195,900
62	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	11,835,550,000
63	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	1,235,000,000
64	3.00.02.3.00.02.01.29.	Program Penelitian dan Pengembangan	785,000,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
65	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	53,199,900,000
66	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	4,000,000,000
67	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	36,364,989,500
68	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	28,000,000,000
69	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	475,000,000
70	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	280,000,000
71	1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Pengawasan Pengendalian Investasi dan Perizinan	36,185,000
72	1.01.04.1.01.04.01.20.	Program pengelolaan areal pemakaman	6,287,185,000
73	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,653,181,900
74	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4,995,000,000
75	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	650,000,000
76	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	3,457,648,000
77	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	90,000,000
78	1.02.05.1.01.04.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	11,612,815,000
79	1.02.08.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	556,203,000
80	1.01.01.1.02.17.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,030,494,000
81	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	200,000,000
82	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	65,000,000
83	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2,753,000,000
84	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan data/informasi	1,711,260,000
85	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9,000,000,000
86	2.00.07.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	655,925,000
87	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	100,000,000
88	2.00.01.2.00.03.01.36.	Program Pengembangan Kemitraan Usaha	15,000,000
89	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	12,028,000,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
90	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	43,175,888,000
91	1.02.10.1.02.10.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	649,768,000
92	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,560,485,500
93	2.00.01.2.00.03.01.34.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	69,300,000
94	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,070,250,000
95	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	4,650,000,000
96	2.00.06.2.00.06.01.25.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	371,997,000
97	1.02.08.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	214,097,500
98	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	578,700,000
99	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1,103,500,000
100	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	70,000,000
101	4.00.01.4.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,095,185,000
102	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	16,068,800,000
103	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	295,915,000
104	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	599,000,000
105	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,311,200,000
106	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	889,200,000
107	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	4,898,000,000
108	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	137,900,000
109	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12,793,222,700
110	4.00.02.4.00.02.01.33.	Program Peningkatan Disiplin Anggota DPRD	-
111	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	4,590,465,000
112	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	968,566,000
113	2.00.03.2.00.03.01.31.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	218,100,000
114	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	178,900,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
115	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	111,000,000
116	3.00.04.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	220,000,000
117	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	145,000,000
118	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	19,132,670,000
119	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	210,780,000
120	3.00.04.3.00.04.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	768,157,000
121	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17,700,000
122	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	4,682,935,000
123	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	850,000,000
124	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	775,131,200
125	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5,697,199,400
126	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	131,612,000
127	1.01.04.1.01.05.01.19.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	210,000,000
128	3.00.04.3.00.04.01.24.	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	25,000,000
129	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	-
130	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	383,500,000
131	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	696,905,000
132	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100,000,000
133	3.00.04.3.00.04.01.22.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara	9,415,515,150
134	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	162,247,350
135	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	69,871,572,000
136	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,032,120,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
137	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	33,423,539,000
138	1.01.01.1.01.01.01.32.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	60,000,000
139	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	2,008,936,000
140	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	726,000,000
141	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	793,188,000
142	1.02.09.1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	292,000,000
143	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	15,045,000,000
144	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	782,550,000
145	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	7,036,501,200
146	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	480,655,000
147	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	17,926,062,000
148	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1,895,555,000
149	2.00.03.2.00.03.01.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	48,650,000
150	2.00.01.2.00.03.01.25.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,616,645,000
151	2.00.03.2.00.03.01.30.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	249,200,000
152	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,376,038,600
153	2.00.03.2.00.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-
154	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	432,314,000
155	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	177,709,508,950
156	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	25,000,000,000
157	1.02.13.2.00.02.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1,545,238,000
158	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	4,460,000,000
159	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	3,600,000,000
160	4.00.02.4.00.02.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	-

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
161	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	950,283,000
162	1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	100,000,000
163	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	52,750,000
164	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	369,000,000
165	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	212,500,000
166	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	339,998,800
167	4.00.02.4.00.02.01.10.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pengembangan Infrastruktur	-
168	4.00.02.4.00.02.01.09.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian (Non Rutin)	-
169	3.00.02.3.00.02.01.27.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	454,964,000
170	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	917,102,400
171	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	385,000,000
172	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	318,560,000
173	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	7,563,381,600
174	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	624,000,000
175	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	180,537,500
176	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	6,302,000,000
177	1.01.04.1.01.05.01.28.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	165,350,000
178	2.00.01.2.00.03.01.26.	Program Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	-
179	1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	78,606,042,000
180	1.01.04.1.01.05.01.27.	Program Sarana dan Prasarana Logistik	3,958,900,000
181	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	150,000,000
182	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	36,406,045,750
183	1.02.08.1.02.02.01.15.014.	Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan	15,000,000

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
184	1.01.01.1.01.01.01.18.021.	Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	72,150,000
JUMLAH			1,473,516,133,200

Sumber : APBD Kota Balikpapan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, bahwa dalam mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2018 yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan dialokasikan 184 program dengan alokasi Rp. 1.473.516.133.200,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia.

Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB tahun 2018. Dasar PK tersebut mengacu pada dokumen RPJMD 2016-2021 dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Laporan LKjIP Tahun 2018

Berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 68,13 (B). Nilai tersebut meningkat dari hasil evaluasi tahun 2017 yaitu dengan nilai 66,19 (B) atau meningkat 1,94 poin. Rincian hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Pada Tahun 2018

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2017	2018
a. Perencanaan Kinerja	30	20,65	21,42
b. Pengukuran Kinerja	25	14,60	15,10
c. Pelaporan Kinerja	15	10,57	10,57
d. Evaluasi Internal	10	5,99	10,69
e. Capaian Kinerja	20	14,38	6,53
Nilai Hasil Evaluasi		66,19	68,13
Tingkat Akutabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Surat KemenpanRB Nomor: B/1084/AA.05/2018

Sehubungan dengan hasil capaian tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan simpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Balikpapan di Tahun 2018 telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor public. Namun demikian, kualitas penerapan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan Sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Balikpapan adalah:
 - a. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada satuan kerja tidak sepenuhnya mampu menjabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan proses bisnis serta tugas fungsi peran yang telah ditetapkan.
 - b. Capaian ukuran kinerja individu telah dijadikan ukuran dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai, meskipun masih ditemukan ketidaksesuaian antara indikator individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai. Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai.
 - c. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja tidak berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja tidak efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan.

- d. Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih megefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan :

1. Melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah agar tetap memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta mekanisme cascade kinerja.
2. *Cascade* kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah ditangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, penyusunan IKU akan mengacu pada *cascade* kinerja tersebut.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dengan meningkatkan kapasitas evaluator Inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program dan keterpaduan lintas Perangkat Daerah, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.
5. Melakukan penyempurnaan atas integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
6. Terus berupaya penyempurnaan sistem penilaian kinerja individu yang di selaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Sistem penilaian kinerja individu hendaknya dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.
7. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusun SKP. Penguatan budaya

kinerja ini juga sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan revidu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Berdasarkan rekomendasi di atas, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut antara lain :

1. Revidu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD telah dilakukan dengan cara melakukan penajaman terhadap sasaran dan indikator kinerja (IKU dan IKI) agar lebih berorientasi kepada hasil dengan fasilitasi dari Kementerian PANRB pada tahun 2018. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan adalah revidu Renstra SKPD oleh Inspektorat.
2. Sejak tahun 2017 dan terus dimantapkan pada tahun 2018, cascade IKU sampai IKI telah disusun perangkat daerah dengan mengacu pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah ditungkan dalam RPJMD. Hal ini telah diimplementasikan melalui penyusunan indikator kinerja utama pada perangkat daerah sudah dilakukan secara berjenjang dan diselaraskan sesuai IKU Walikota, Esselon II, Esselon III sampai Esselon IV. Hal ini terus dilakukan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan terus berlanjut di tahun 2019. Monitoring terhadap realisasi IKU dan IKU dilakukan secara berkala ber triwulan.
3. Evaluator yang ada di Inspektorat Kota Balikpapan selalu mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan Bimtek yang terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam melakukan evaluasi kinerja (SAKIP) SKPD sehingga mampu memberikan saran/rekomendasi perbaikan-perbaikan kinerja SPKD.
4. Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berkala (per triwulan) selalu melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan setiap SKPD berdasarkan Renjanya masing-masing. Agar evaluasi tersebut lebih efisien, Bappeda Kitbang Kota Balikpapan telah berinisiatif untuk membuat sistem aplikasi evaluasi Renja yang dinamai aplikasi SiPeKa dan dinisiasi sejak tahun 2018. Evaluasi tersebut mencakup outcome fisiknya maupun terhadap kinerja anggaran yang terkait dengan yang mendukung pencapaian sasaran.
5. Dalam perencanaan kinerja tahunan selalu diupayakan integrasi antara target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan target kinerja yang dalam RPJMD dengan kebuuhan dana (money follow program). Target kinerja ditetapkan

terlebih dahulu, kemudian penetapan program beserta dana yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Penetapan target kinerja tersebut berdasarkan informasi capaian kinerja melalui diperoleh melalui evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan kekurangan target yang ingin dicapai.

6. Perbaikan penilaian capaian kinerja individu secara cascading dan sudah selaras terus dilakukan, baik secara manual maupun menggunakan sistem aplikasi. Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah menginisiasi penggunaan aplikasi dalam penilaian kinerja individu (IKI) dengan nama aplikasi "SIPINTAR". Penilaian capaian kinerja tersebut dilakukan per triwulan.
7. Budaya kinerja berbasis output sudah mulai ditinggalkan dan mulai membangun budaya kinerja berbasis *outcome*. Membangun budaya kinerja telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan memaksa setiap SKPD membuat cascading kinerja IKI yang selaras dengan IKU SKPD masing-masing. Hal ini terus dilakukan sampai sekarang dan menjadi budaya kinerja, Hal yang tertulis dilakukan adalah penajaman dan peningkatan kualitas indikator kinerja inidvidu itu sendiri melalui berbagai aktivitas dalam rangka reuiu terhadap *cascading* indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada poin (1) dan poin (6) di atas.

2. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Permen PANRB No. 53/2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2018 didasarkan atas minimal 4 pengukuran yaitu :

- a. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2018;
- b. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2017 dan realisasi capaian tahun 2018; dan
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

- d. Perbandingkan capaian kinerja tahun 2018 Kota Balikpapan dengan capaian kinerja Pemerintah Kab/Kota lain, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Nasional (jika ada).

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB, dan telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2018.

Target yang diperjanjikan pada tahun 2018 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar pada Bab II Laporan ini. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2018 untuk 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.47	10.58	101.05%
		2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.93	14.23	102.15%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1 Angka Harapan Hidup (tahun)	73.97	73.98	100.01%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU	
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.30	9.52	55.67%
		2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63.68	64.33	101.02%
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1	Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)	78.73	79.71	101.24%
		2	Tingkat Kemiskinan (%)	2.33	2.64	88.26%
		3	Indeks Pembangunan Gender (angka indeks)	91.00	89.74	98.62%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks)	59.5	59.58	100.13%
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1	<i>Livable City Index</i> (angka indeks)	73.00	81.3	111.37%
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks)	76.00	80.35	105.72%
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1	Indeks Gini Ratio (angka indeks)	0.33	0.31	106.45%
		2	PDRB perkapita (Rp. Juta)	143.33	142.35	99.32%
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1	PDRB non migas (Rp.Triliun)	67.46	67.46	100.00%
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP	WTP	100.00%
		2	Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks)	6.70	6.87	102.54%
		3	Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala)	79.76	78.78	98.77%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
		4 Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	68,00 (B)	68,13 (B)	100.19%
		5 Penilaian Kepatuhan (angka skala)	65.00	83.19	127.98%
		6 Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks)	84.00	92,58	110.21%

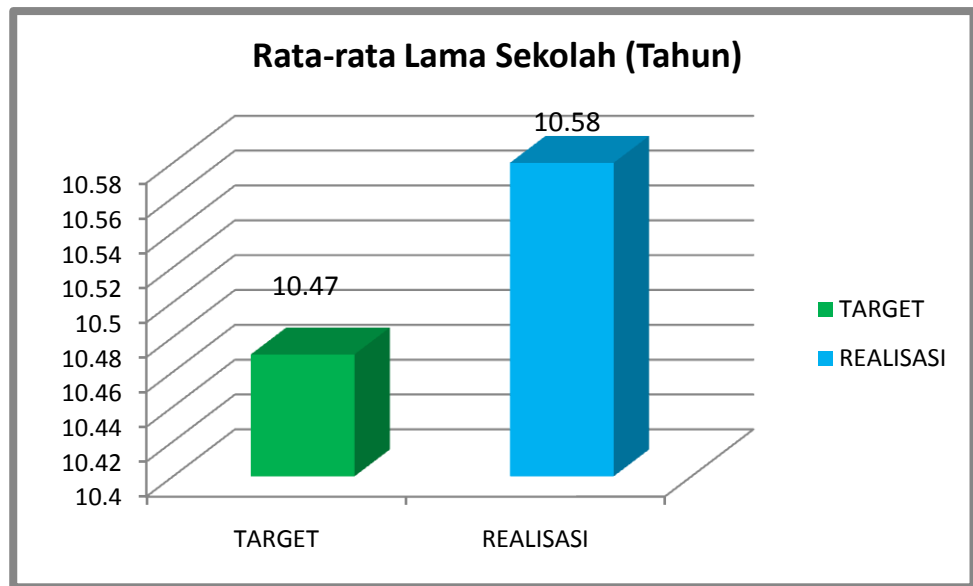
Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bappeda Litbang tahun 2018

Berdasarkan tabel 3.1. dari 20 Indikator Kinerja Utama yang diukur capaian kinerjanya terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang tercapai atau 80% dari Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan memenuhi/melebihi dari target yang ditetapkan, dan 5 Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai atau 20% Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan kurang dari target yang ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah sebesar 10,47 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 10,58*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 101,05% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Rata-rata Lama Sekolah tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 3.1

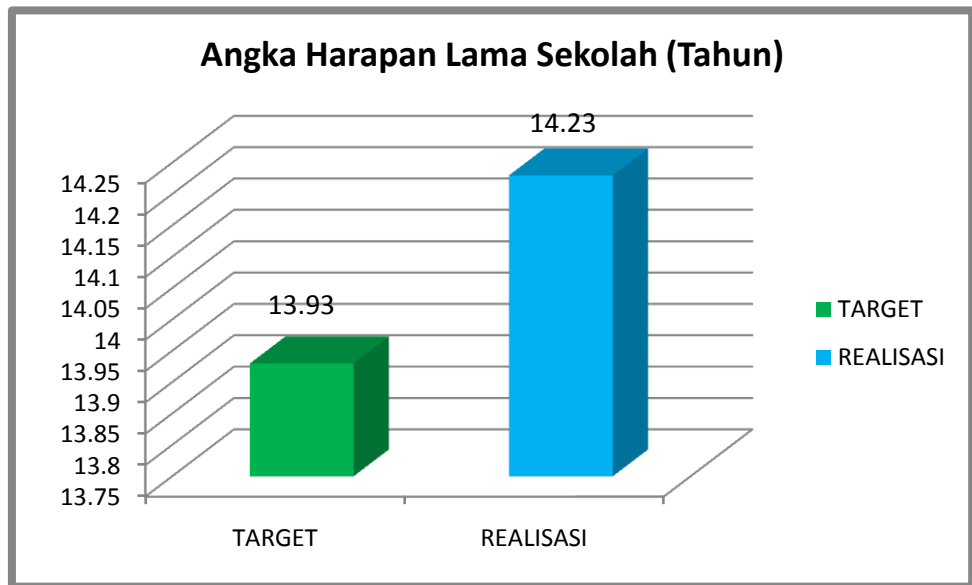
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018

Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 101,05% menunjukkan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari jumlah tahun yang digunakan masyarakat dalam menjalani pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi S2/S3.

Berdasarkan Keberhasilan capaian realisasi Rata-rata Lama Sekolah tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Target IKU Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,93 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 14,23*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 102,15% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.2

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018**

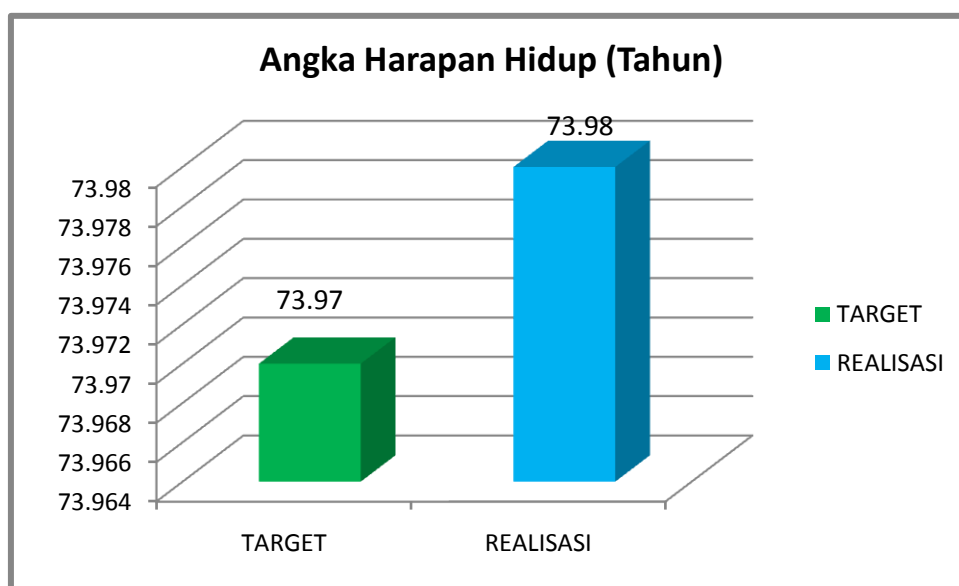
Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 102,15% menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan bersama perangkatnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari waktu tempuh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat kota Balikpapan untuk menerima layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama.

Berdasarkan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Target Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup sebesar 73,97 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 73,98*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,01% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.3
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Angka Harapan hidup Tahun 2018**

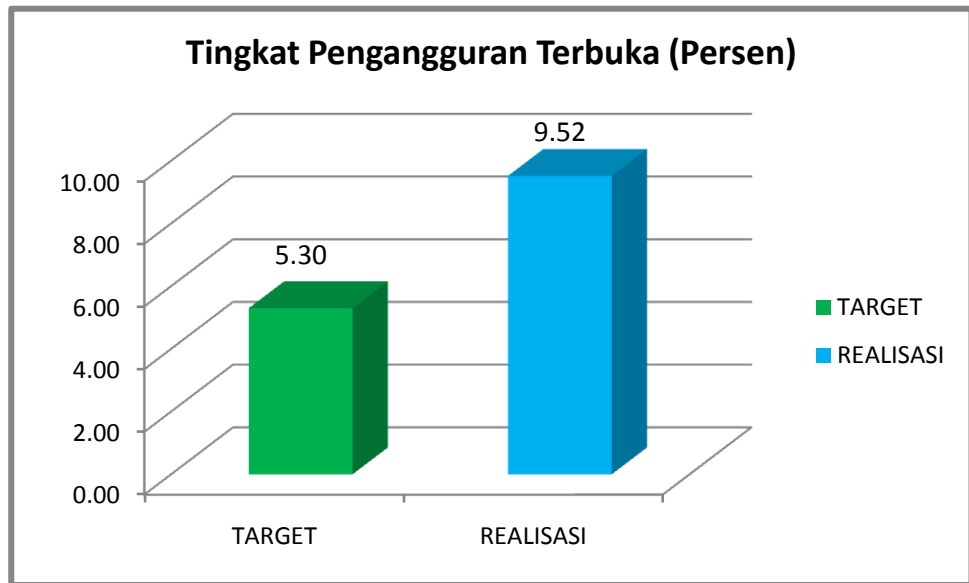
Capaian IKU Angka Harapan Hidup sebesar 100,01% menunjukkan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Berdasarkan capaian tersebut, maka pemerintah kota bersama perangkat daerah perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal tersebut perlu tersedianya informasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan secara murah dan dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat di Kota Balikpapan.

4. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk)

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 5,30% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar

9,52%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 55,67% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.4
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018**

Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 55,67% merupakan ketidak keberhasilan pemerintah kota dalam memecahkan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan di kota Balikpapan. Hal ini terjadi karena :

- a. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa total pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja sangat rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2018.
- b. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.

- c. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2018. Besarnya pemutusan hubungan kerja terjadi pada sektor migas dan pertambangan, sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja tersebut memberikan sumbangan pada tingkat pengangguran terbuka.
- d. Ketersediaan angkatan kerja yang kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan.
- e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

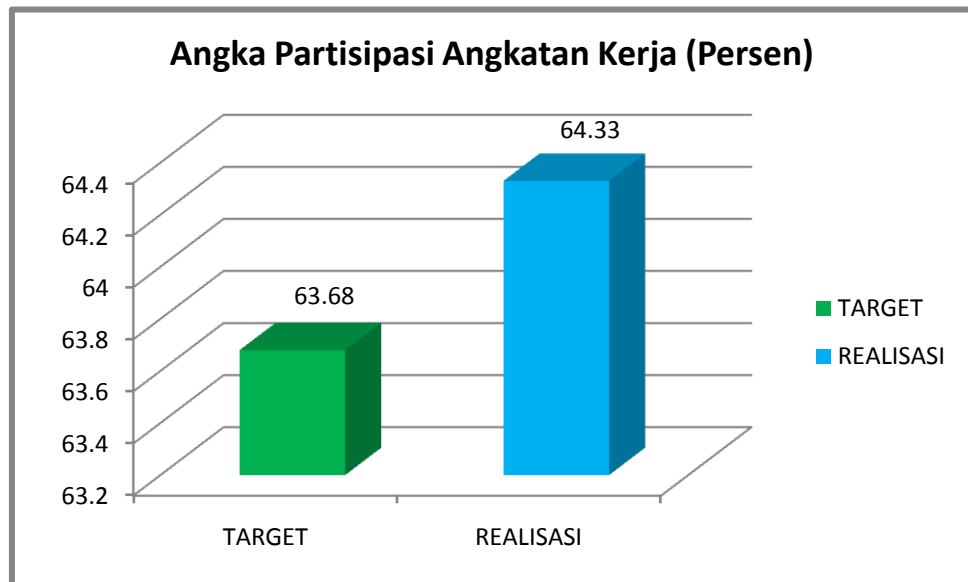
Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, maka pemerintah kota berupaya :

- a. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah.
- b. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
- c. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
- d. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Melaksanakan review dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,68% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 64,33%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja

Utama sebesar 101,02% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.5
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018**

Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% merupakan *add value* bagi pemerintah kota sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja diusia produktif, hal ini berarti pemerintah kota Balikpapan telah memasuki bonus demografi. Bonus demografi adalah bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

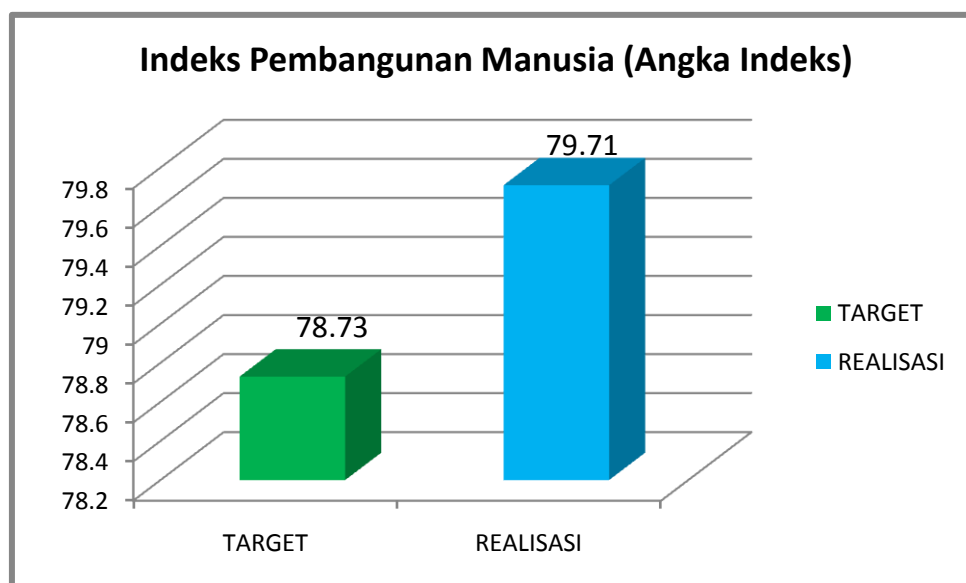
Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan secara baik maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga gizi yang cukup.

Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Selain itu masyarakat juga harus mendukung program Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada : a) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas, b) Meningkatkan Pendidikan, c) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, d) Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, e) Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan, f) Meningkatkan Produksi Pangan dan f) Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target IKU IPM sebesar 78,73 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 79,71. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU perbandingan antara target dan realisasi sebesar 101,24%. Sejalan dengan capaian kinerja IPM diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.6.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018

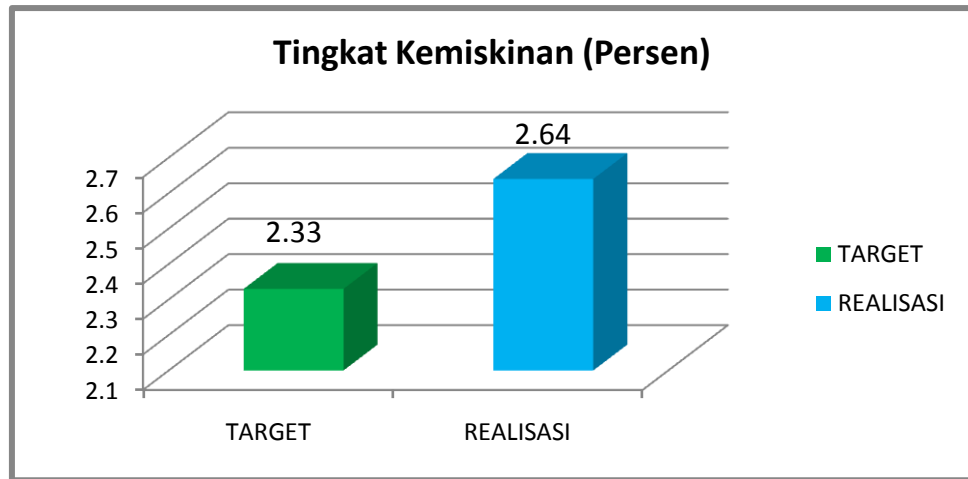
Capaian IKU IPM sebesar 101,24% menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan telah berhasil membangun kualitas hidup manusia khususnya penduduk kota Balikpapan tahun 2018. IPM merupakan komposit dari kinerja bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan, oleh sebab itu nilai IPM merupakan keberhasilan kualitas hidup manusia yang dicapai penduduk kota Balikpapan pada umumnya telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan..

Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2018 adalah :

- a. Memberikan akses layanan yang mampu memberikan layanan seluas-luasnya ditinjau dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.
- b. Meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kota Balikpapan.

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 2,64%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Tingkat Kemiskinan antara target dan realisasi sebesar 88,26%. Sejalan dengan capaian kinerja Tingkat Kemiskinan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.7

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2018

Capaian IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 88,26% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan kurang berhasil dalam menekan Tingkat Kemiskinan di kota Balikpapan sesuai dengan target Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% pada tahun 2018. Berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai akhir 2017 mencapai 17.680 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,82%. Kondisi sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 17.008 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan mencapai 2,64% artinya target kinerja Tingkat Kemiskinan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,31%. Tingkat Kemiskinan di Kota Balikpapan disumbang oleh faktor jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) sampai akhir tahun 2018.

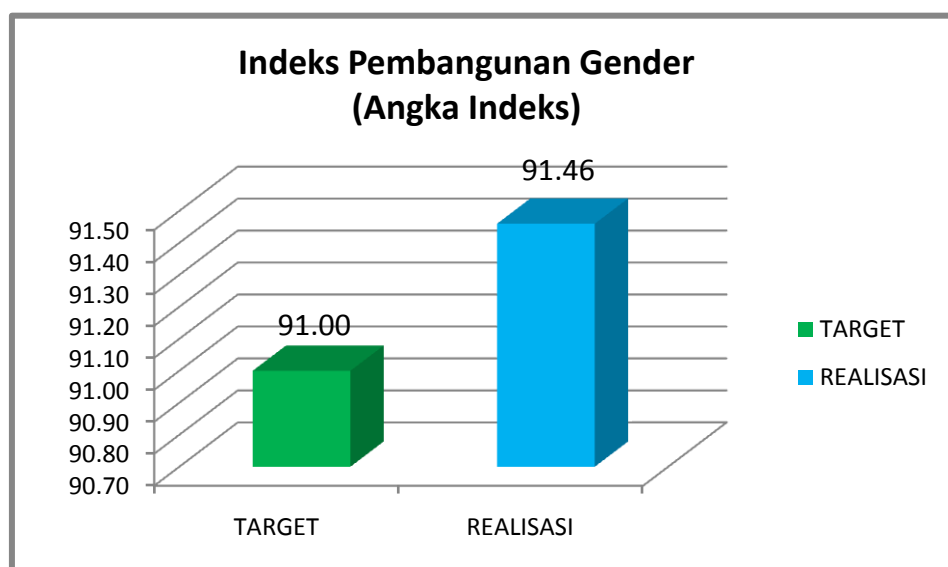
Kondisi nilai Tingkat Kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, artinya Tkm tidak berarti bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka juga harus rendah. Penjelasanannya adalah bahwa para pekerja terdiri atas kelas-kelas penghasilan yang diterimanya, sehingga ekondisi ekonominya bisa di atas Garis Kemiskinan atau di bawah Garis Kemiskinan, tergantung penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini penduduk Kota Balikpapan rendah TKm-nya yang berarti bahwa sebagian besar kondisi ekonomi penduduk Balikpapan di atas Garis Kemiskinan.

Adapun kondisi Tingkat Pengganguran Terbuka di Balikpapan masih tinggi, terutama pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi disebabkan oleh para pencari kerja terutama eks PHK masih memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup baik (di atas Garis Kemiskinan).

Upaya tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm pada tahun 2018 adalah 1) menekan laju pertumbuhan Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk), 2) mengatasi tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk atau rasio gini di kota Balikpapan, c) Mengendalikan inflasi.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 91,46. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender antara target dan realisasi sebesar 100,51%. Sejalan dengan capaian kinerja IPG diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.8

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018**

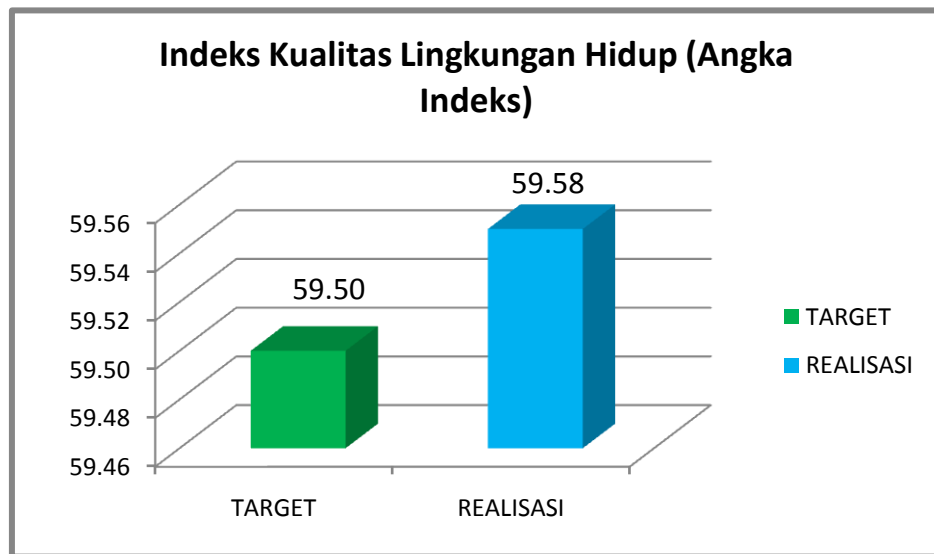
Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,51% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia ditinjau dari ketimpangan gender di kota Balikpapan sesuai dengan target angka IPG sebesar 91,00 pada tahun 2018.

Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian IPG kota Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar 90,11 dan capaian angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2017 adalah 89,74. Berdasarkan realisasi tersebut capaian IPG kota Balikpapan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 91,46*. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2018 (angka proyeksi) tersebut menunjukkan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 adalah meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, meminimalisasi tingkat kekerasan bagi perempuan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 59,50 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 59,58. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara target dan realisasi sebesar 100,13%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLH diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.9.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,13% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018.

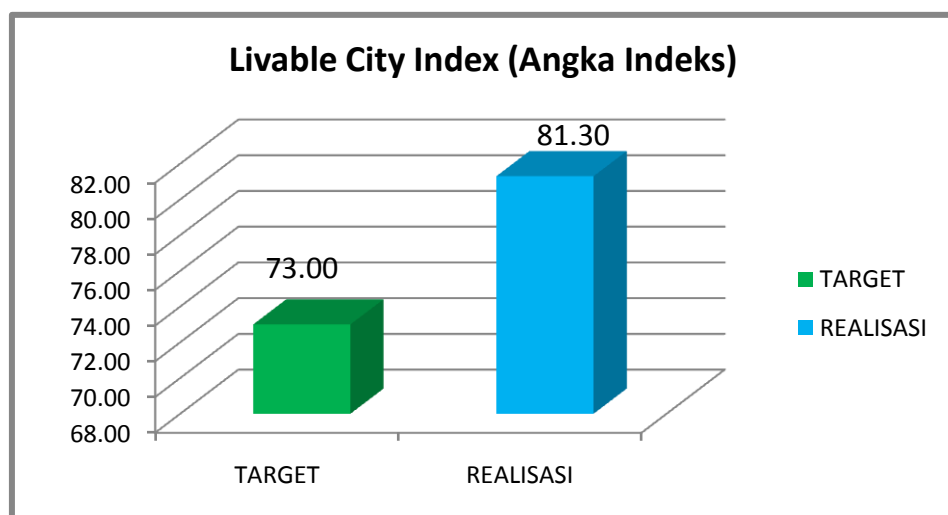
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2015 sebesar 63,88; tahun 2016 sebesar 62,45; dan tahun 2017 sebesar 61,25. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,67 poin pada tahun 2018 dibandingkan tahun capaian 2017. Penurunan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2018 mengarah pada kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi atas kualitas air, udara dan tutupan hutan/lahan yang mengalami tekanan negatif oleh aktivitas masyarakat dan usaha di kota Balikpapan. Pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan usaha (kantor, restoran, warung, hotel dll) dan limbah B3,

pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengupasan lahan yang kurang terkendali.

Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

10. *Livable City Index (LCI)*

Target IKU *Livable City Index* sebesar 73,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 81,30. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU *Livable City Index* antara target dan realisasi sebesar 111,30%. Sejalan dengan capaian kinerja *Livable City Index* diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



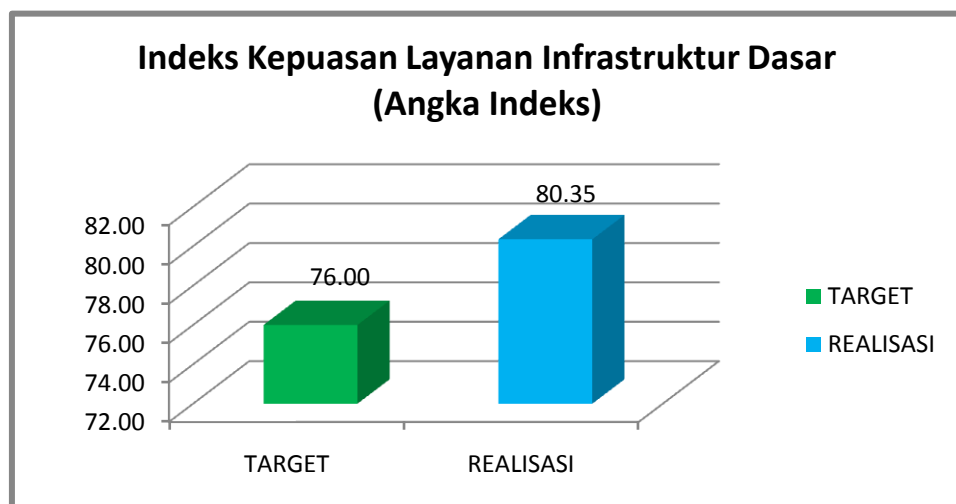
Gambar 3.10.

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Livable City Index Tahun 2018**

Capaian IKU *Livable City Index* sebesar 111,30% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kenyamanan yang didasarkan atas persepsi masyarakat di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka *Livable City Index* sebesar 73,00 pada tahun 2018. Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU *Livable City Index* pada tahun 2018 adalah berfokus dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan terhadap layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 80,35. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur antara target dan realisasi sebesar 105,72%. Sejalan dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.11.

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2018**

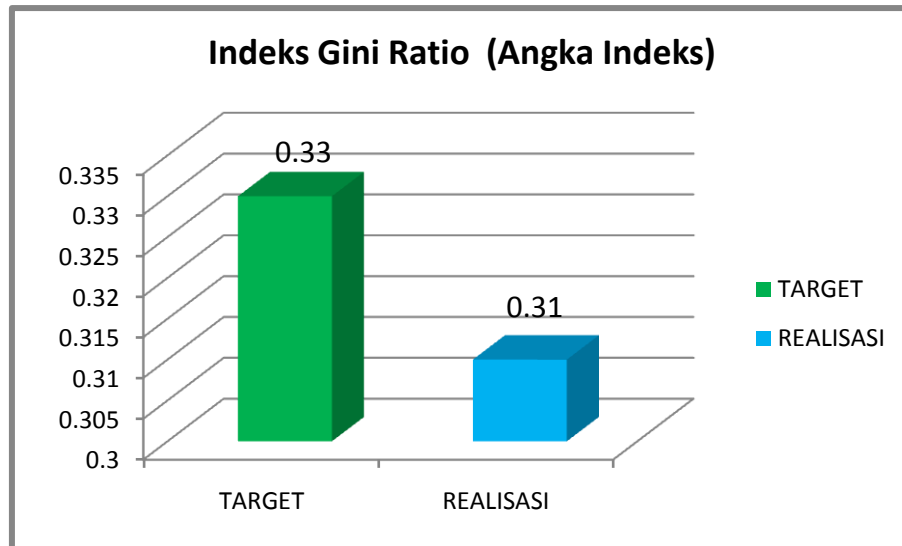
Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 105,72% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 pada tahun 2018. Angka capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2018 diukur berdasarkan kepuasan masyarakat kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2018 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

12. Gini Ratio (GR)

Target IKU *Gini Ratio* sebesar 0,33 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 0,31. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU *Gini Ratio* antara target dan realisasi sebesar 106,45%. Sejalan dengan capaian kinerja *Gini Ratio* diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.12.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Gini Ratio Tahun 2018

Berdasarkan capaian IKU tersebut, untuk mengukur ketimpangan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Angka koefisien gini Ratio kota Balikpapan dari selama periode 2008-2014 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien *Gini Ratio* maka kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan tahun 2011 -2014 dibawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian *Gini Ratio* kota Balikpapan mencapai 0,31. Angka capaian tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah, dimana pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU *Gini Ratio* pada tahun 2018 adalah:

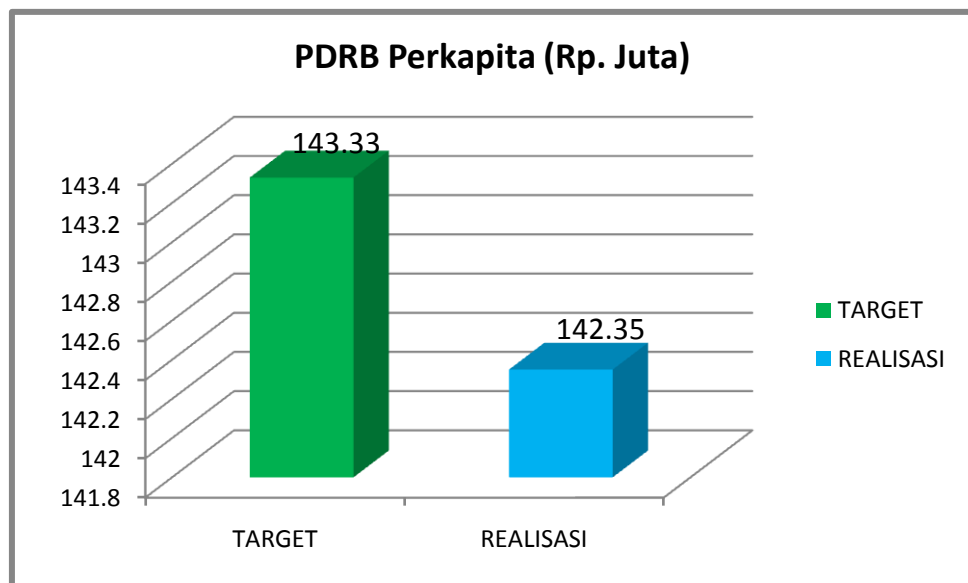
- a. Pengendalian tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial.
- b. Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru.
- d. Menciptakan wirausaha secara missal.

13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita sebesar Rp.143,33 Juta sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp. 142,35 Juta. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita antara target dan realisasi sebesar 99,32%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto Perkapita diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.

Permasalahan tidak tercapainya IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dikarenakan oleh optimisnya penentuan target capaian tahun 2018 yang didasarkan atas proyeksi yang dilakukan dengan asumsi membaik, namun Produk Domestik Regional Bruto Perkapita masih mengalami kontraksi negatif pada sejumlah sektor produk sebagai sumber pendapatan.

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.13.

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2018**

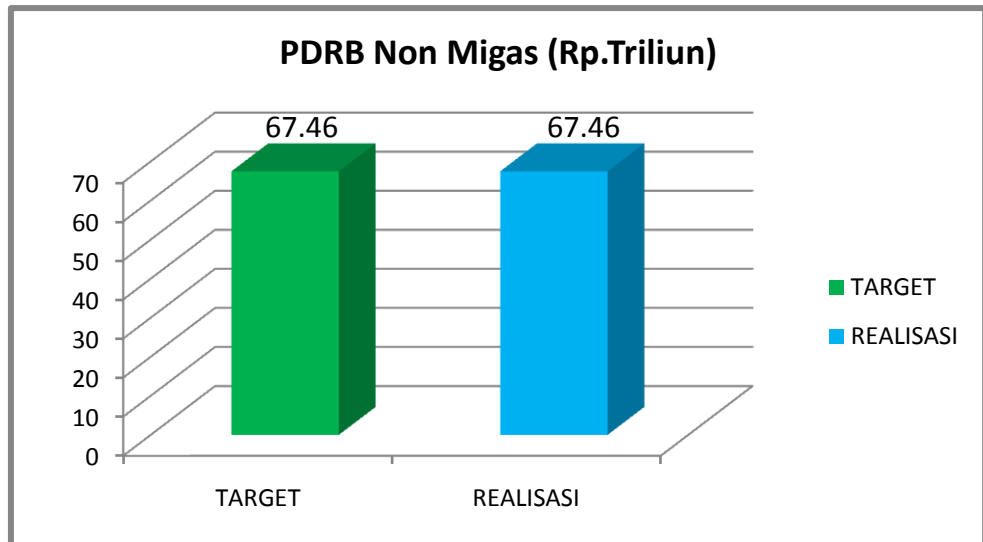
Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2018 adalah:

- a. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Pengembangan yang dilaksanakan untuk mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dengan meningkatkan usaha sentra industri kecil hasil pertanian dan kelautan.
- b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal.
- c. Meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa.
- d. Meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencaker lokal.

14. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar Rp. 67,46 Triliun sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp. 67,46 Triliun. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto Non Migas diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.14.
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Tahun 2018

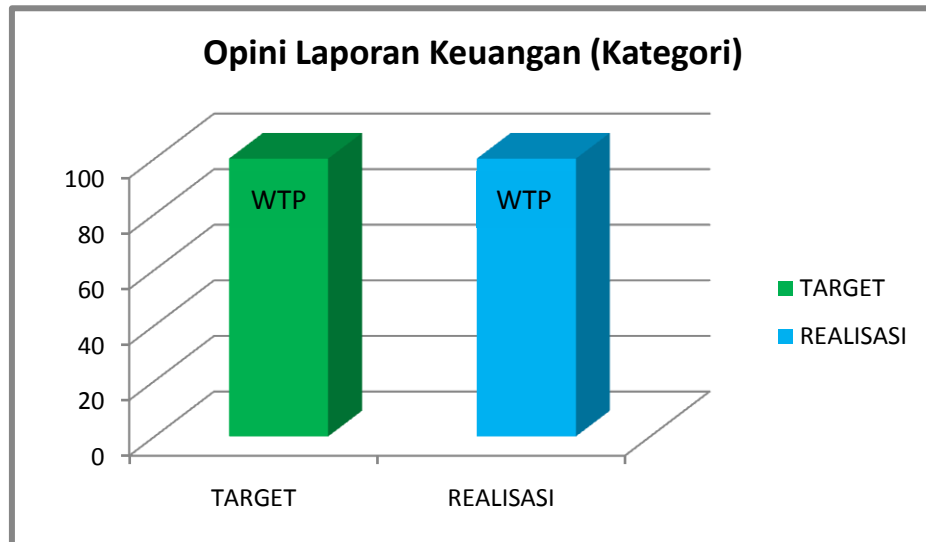
Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah kota Balikpapan.
- b. Meningkatkan kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sector ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan yang terus dapat meningkat tiap tahunnya.
- c. Mempercepat pengembangan kawasan industri kariatangau dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota Balikpapan. Selain itu melakukan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

15. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai dengan kategori “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**”. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Opini Laporan Keuangan antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Opini

Laporan Keuangan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



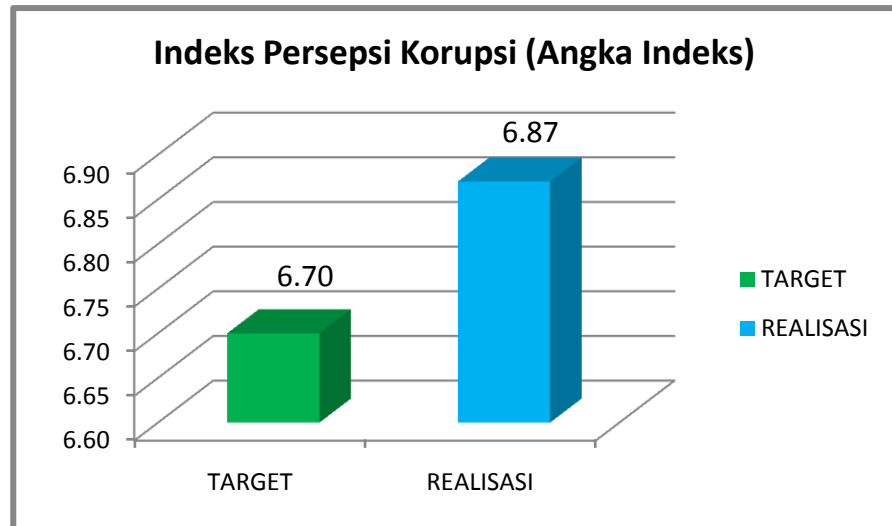
Gambar 3.15.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2018

Tercapainya IKU Opini Laporan Keuangan dengan Kategori WTP merupakan komitmen pemerintah kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori WTP.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi adalah 6,70 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 6,87. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi antara target dan realisasi sebesar 102,54%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



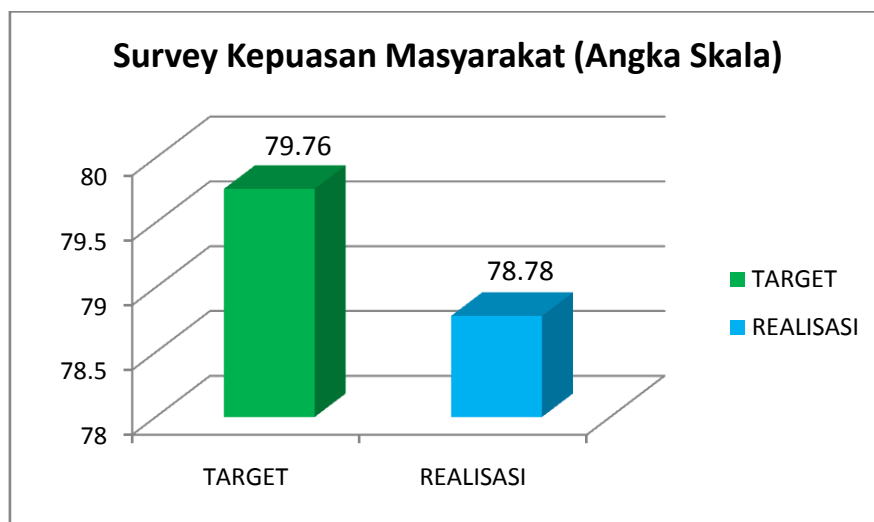
Gambar 3.16.
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018

Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi sebesar 102,54% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2017, pemerintah kota Balikpapan telah membangun media aplikasi perencanaan pembangunan daerah atau yang lebih dikenal e-planning.
- b. Pada tahun yang sama dibangun pula aplikasi e-database untuk memberikan dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial.
- c. Pada tahun 2018, untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan membangun e-Monev.
- d. Pada tahun 2018, pemerintah kota Balikpapan, melaksanakan perencanaan menggunakan aplikasi e-planning dengan nama SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan).
- e. Pemerintah kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola keuangan dari BPK selama 4 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2017) kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 79,76 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 78,78. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat antara target dan realisasi sebesar 98,91%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



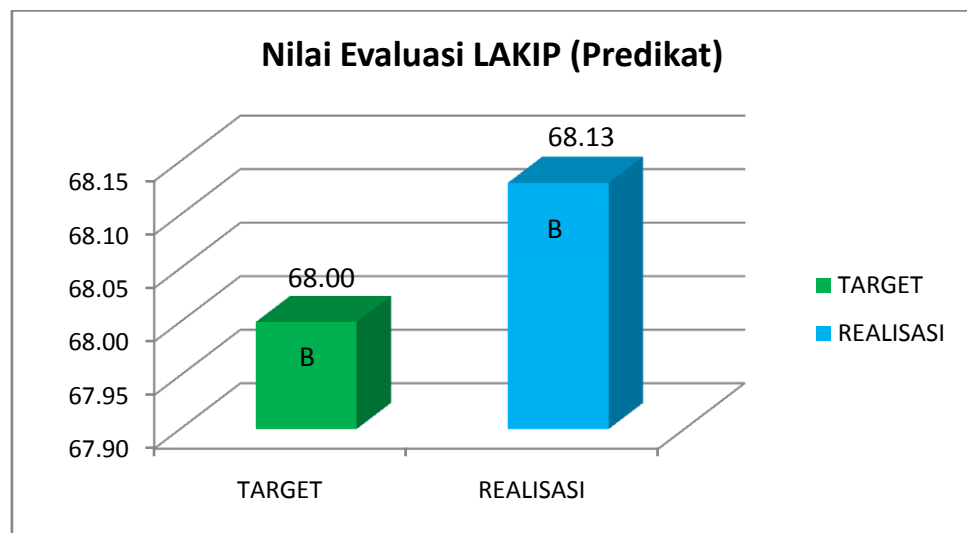
Gambar 3.17
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

Permasalahan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 adanya peningkatan nilai mutu layanan didasarkan atas Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan kondisi layanan fasilitas umum yang kurang memadai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat layanan yang dinilai masih kurang yaitu layanan pariwisata pada UPTD Manggar, layanan Puskesmas, dan layanan pasar.

18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 68,00 dengan predikat B sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 68,13 dengan predikat B. Berdasarkan

realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP antara target dan realisasi sebesar 102,93%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.18
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2018

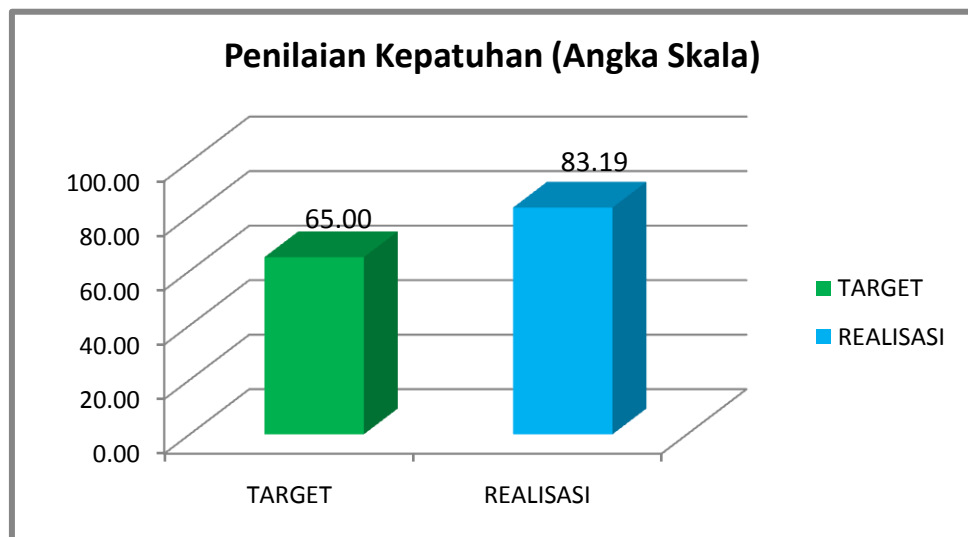
Capaian IKU Evaluasi AKIP sebesar 102,93% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja RPJMD periode 2016-2021.
- b. Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian Kinerja, untuk memastikan kualitas indikator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan memperhatikan kriteria indikator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan cukup.

- c. Melakukan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah ditindaklanjuti dengan melakukan reuiu atas IKU kota pada tahun 2018).
- d. Melakukan montoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021).
- e. Melaksanakan bimtek Aplikasi SILAKIP yang dibangun Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh perangkat daerah.
- f. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

19. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 65 (zona kuning) sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 83,19 (zona hijau). berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kota Balikpapan pada tahun 2017. Karena sudah sudah berada pada zona hijau, maka ORI tidak melakukan penilaian lagi. Oleh sebab itu, capaian Penilaian Kepatuhan pada tahun 2018 dianggap sama dengan tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.19

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penilaian Kepatuhan Tahun 2018

Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayanan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
- b. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan.
- c. Mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

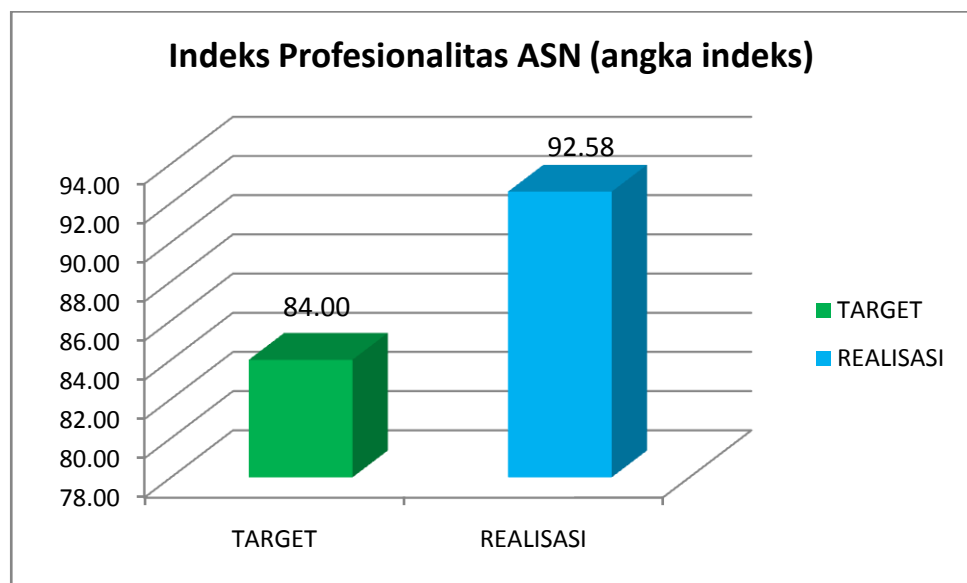
20. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 83 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 92,58 berdasarkan metode perhitungan lama oleh BKPSDM). Jika dihitung dengan menggunakan metode baru, maka nilai capaiannya hanya 59,19. Perbedaan metode ini memberikan perbedaan hasil capaian yang sangat signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan metode perhitungan tersebut :

- a. Metode menggunakan sistem sampling sebanyak 10 SKPD, sedangkan metode baru tidak menggunakan sistem sampling, tapi seluruh SKPD (36 SKPD);
- b. Metode lama tidak memperhitungkan jumlah ASN yang tingkat pendidikan (SD/SMP/SMA/S1 dan S2) dalam setiap SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu;

c. Metode lama tidak memperhitungkan keselarasan *job description* dengan latar belakang pendidikan ASN per SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkannya, dan seterusnya.

Dengan memperhatikan konsistensi kronologis data untuk memudahkan perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018, maka untuk sementara pembahasan capaian kinerja terhadap target diputuskan masih menggunakan data hasil perhitungan metode lama, namun data hasil perhitungan dengan metode baru tetap disajikan. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.20

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018**

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN yang diperoleh dari jumlah nilai SKP ditambah dengan selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja dan jumlah pelanggaran disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan angka capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 92,58 menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kota Balikpapan memiliki predikat yang baik dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsinya pada tiap perangkat daerah. Sehubungan hal tersebut capaian kinerja indicator terhadap target sebesar

110,21 % artinya kinerja atas indikator profesionalitas mengalami peningkatan dan melampaui dari target PK Wali Kota Balikpapan pada tahun 2018.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- a. Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
- b. Memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

3.2. Pengukuran Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, Tahun 2017 Terhadap Tahun 2018.

Perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016, tahun 2017 terhadap capaian realisasi IKU tahun 2018 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

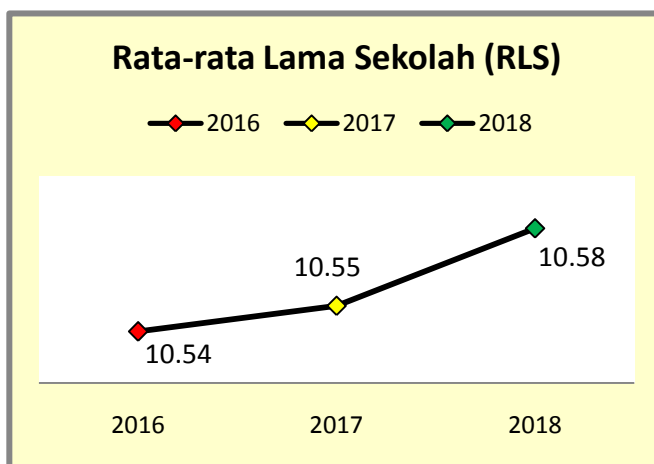
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi		
			2016	2017	2018
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.54	10.55	10.58
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.59	13.75	14.23
3	Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.96	73.97	73.98
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTk)	Persen	5.45	10.39	9.52
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63.28	63.38	64.33
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	78.57	79.01	79.71
7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2.81	2.82	2.64
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	90.11	89.73	89.74
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	62.45	61.25	59.55
10	<i>Livable City Index (LCI)</i>	Angka Indeks	0	80.81	81.30

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi		
			2016	2017	2018
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	Angka Indeks	0	78.10	80.35
12	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0	0.32	0.31
13	PDRB perkapita	Rp. (Juta)	127.24	136.37	142.35
14	PDRB non migas	Rp. (Triliun)	46.06	51.01	67.46
15	Opini laporan keuangan (OLK)	Kategori	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai Kriteria	6.62	6.64	6.87
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	69.38	78.69	78.78
18	Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat	60.85 (B)	66,19 (B)	68,13 (B)
19	Penilaian Kepatuhan	Angka Indeks	74.20	83.19	83.19
20	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Angka Indeks	83.00	87.73	92.58

Sumber : Hasil pengolahan data LKjIP, Bappeda Litbang 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi 20 (dua puluh) IKU pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki trend capaian untuk masing-masing IKU. Sehubungan dengan realisasi tersebut dapat dideskripsikan perbandingan capaian realisasi IKU sebagai berikut:

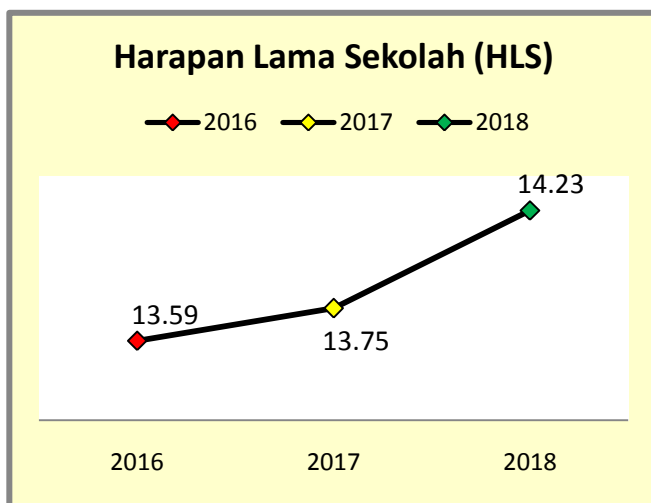
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Pada trend grafik menunjukkan capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,03 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dibidang urusan pendidikan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,58 tahun atau hampir menamatkan kelas XI.

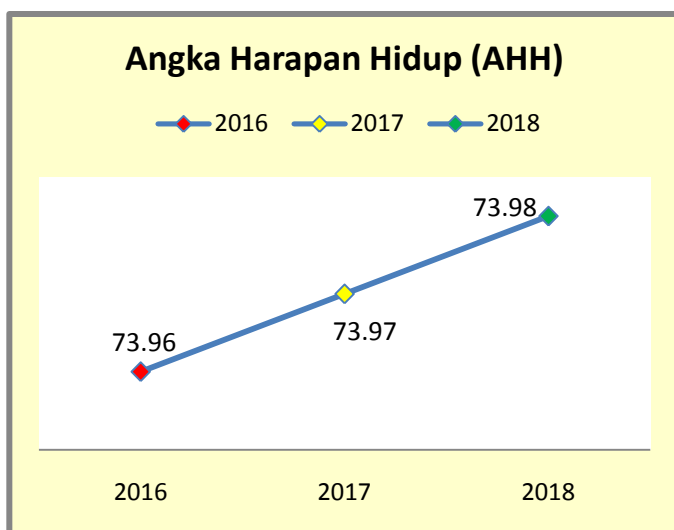
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)



Pada gambar grafik menunjukkan bahwa capaian IKU Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,48 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dibidang urusan pendidikan telah

dilaksanakan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,23 tahun atau setara dengan Diploma III.

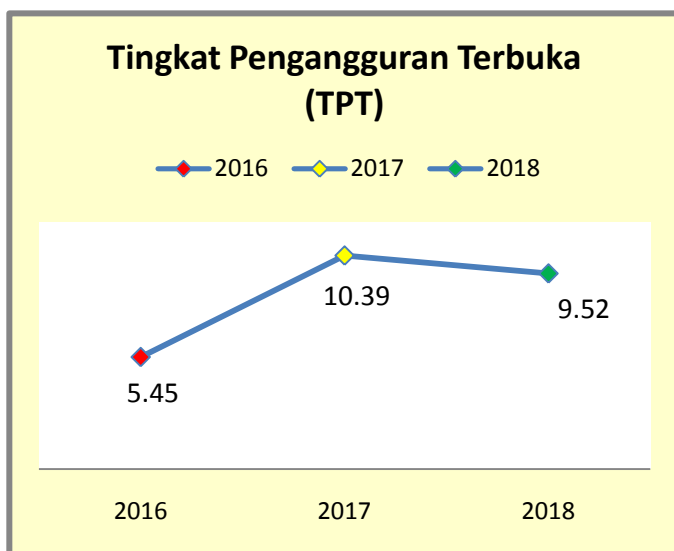
3. Harapan Hidup (AHH)



Pada gambar grafik menunjukkan bahwa capaian IKU Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat yang cukup signifikan pada indikator AHH sebesar 0,01 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan dibidang urusan kesehatan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga bahwa bayi yang dilahirkan tahun 2018 usia harapan hidupnya mencapai 73,98 tahun.

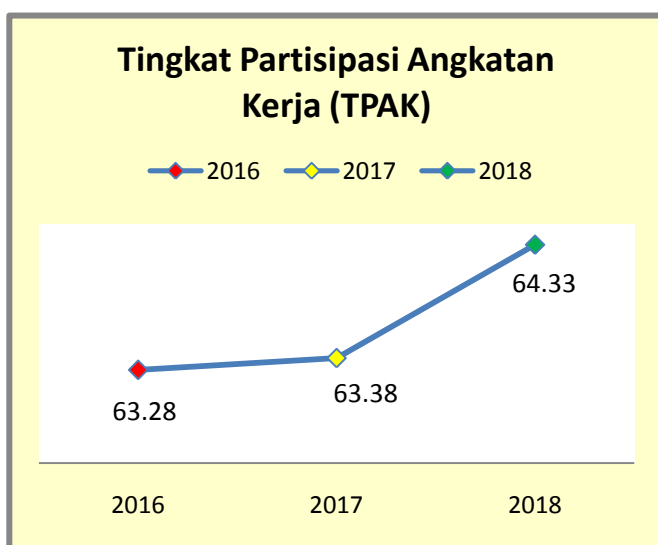
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Pada gambar grafik menunjukkan bahwa capaian IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,87 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di bidang urusan

ketenagakerjaan telah dilaksanakan untuk menekan pengangguran di Kota Balikpapan. Capaian IKU tersebut dinilai masih jauh dari target yang diperjanjikan sebesar 5,30%, sehingga TPT yang tinggi menunjukkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

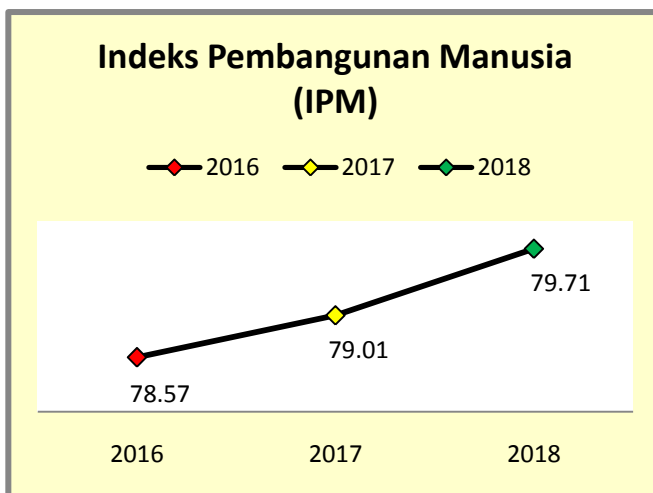
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Pada gambar grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,95 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan

di bidang urusan ketenagakerjaan telah dilaksanakan untuk meningkat pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

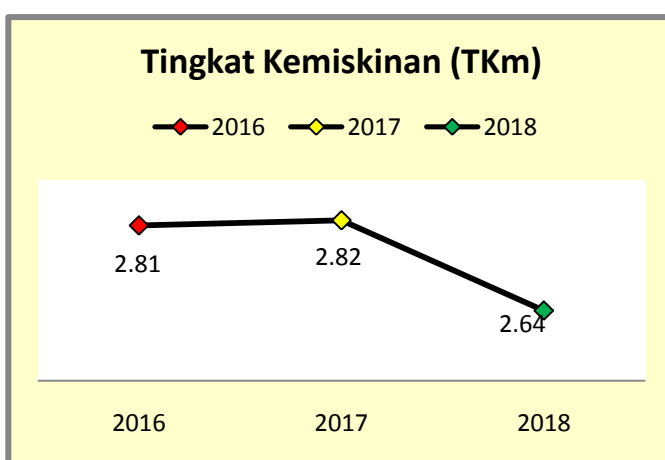
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Pada gambar grafik menunjukkan trend data capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,70 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan di bidang urusan pendidikan, kesehatan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan sebagai ukuran kinerja Pemerintah serta IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

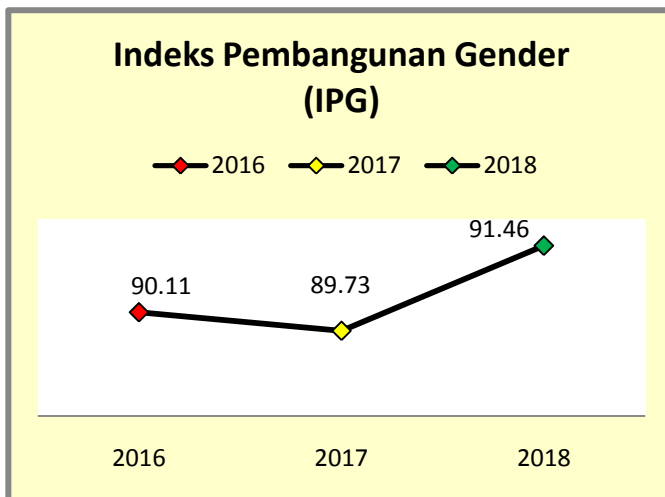


Pada gambar grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Tingkat Kemiskinan (TKm) Kota Balikpapan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,18 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan di bidang sosial, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, pendidikan, kesehatan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja, Perumahan dan Permukiman telah dilaksanakan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan.

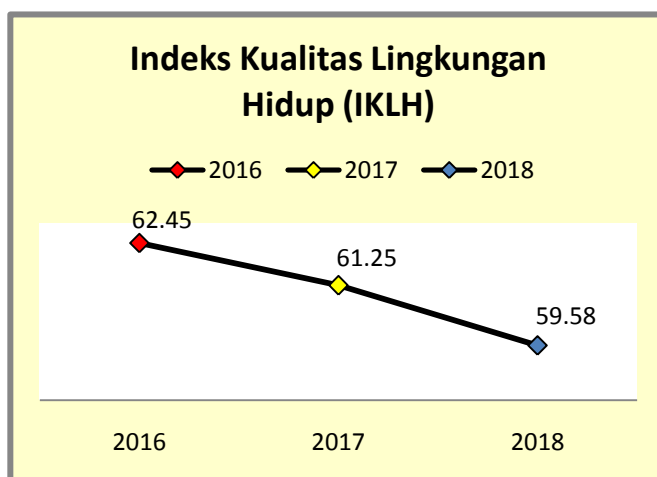
8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,73 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017.

Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan dalam upaya menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan hasil capaian IPG pada tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya IPG maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hal ini berdampak pada capaian kesetaraan antar laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Kota Balikpapan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

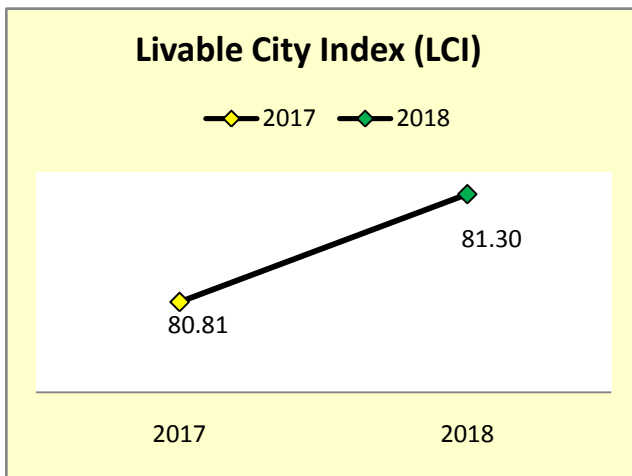


Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan pada tahun 2018 menurun sebesar 1,67 yang merupakan hasil selisih dari

perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017.

Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut mengalami penurunan capaian disebabkan oleh penurunan indikator Tutupan Lahan, hal penurunan tersebut disebabkan oleh pengupasan dan pengolahan lahan oleh masyarakat, pengembang perumahan, dan pengembangan usaha dan industri sehingga menyebabkan luasan tutupan lahan menjadi berkurang.

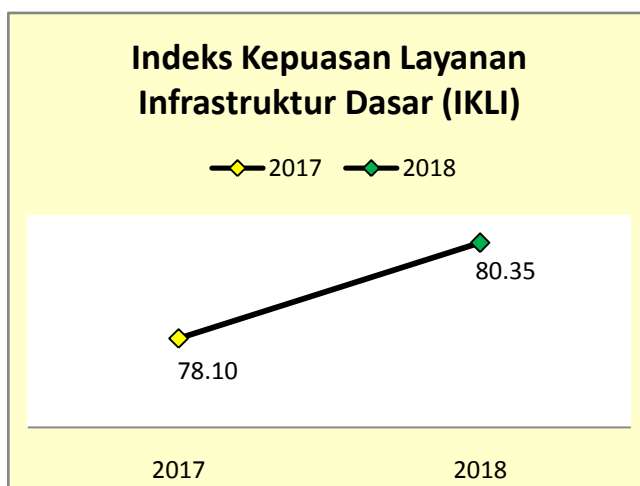
10. *Livable City Index (LCI)*



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU *Livable City Index (LCI)* Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,49 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan memiliki arti bahwa berdasarkan survey *Most*

Livable City Index oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Kota Balikpapan adalah kota yang konsisten menjadi kota yang layak huni bagi warganya.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)

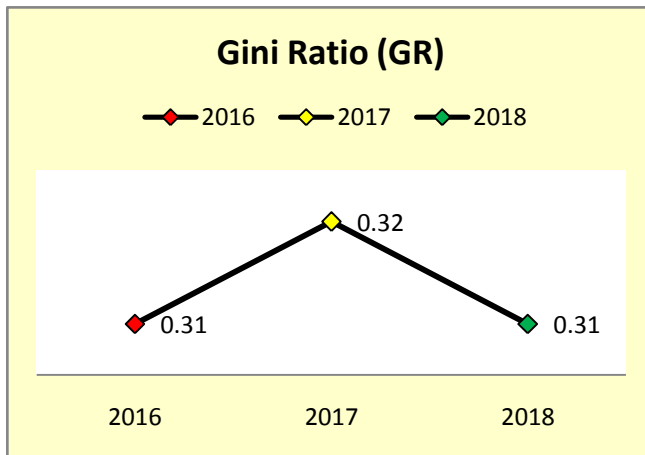


Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,25 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan

capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya berkelanjutan dalam peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pembangunan jalan dan jembatan,

pembangunan drainase dan saluran air, penyiapan bozem, penyediaan fasilitas persampahan, TPS dan TPA, Penyediaan rambu-rambu jalan, Peningkatan *Traffic Light* Jalan dan Persimpangan, Fasum dan Fasos dan infrastruktur lainnya.

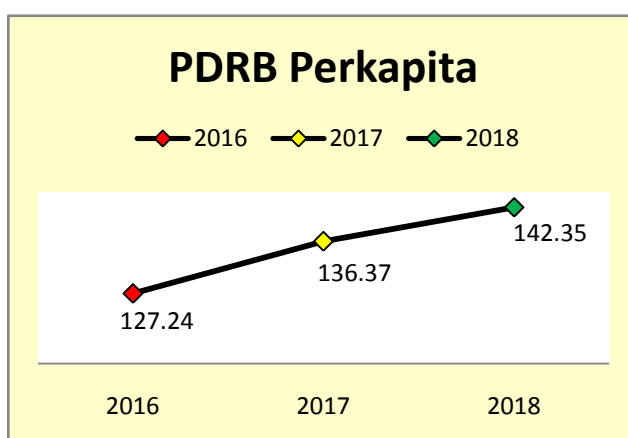
12. Gini Ratio (GR)



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU *Gini Ratio* (GR) Kota Balikpapan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,01 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Penurunan capaian indikator GR tersebut menunjukkan

bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada strata menengah ke bawah. Apabila capaian *Gini Ratio* menunjukkan penurunan berarti rentang ketimpangan atau gap pengeluaran menjadi turun seiring indeks penurunan pada indikator *Gini Ratio*, sehingga hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan akan semakin baik. Capaian Gini Ratio di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh adanya kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah, adanya kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bansos yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah serta menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah bawah dampak dari pembangunan infrastruktur, lebih kondusifnya pengembangan usaha dan beragam skema perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

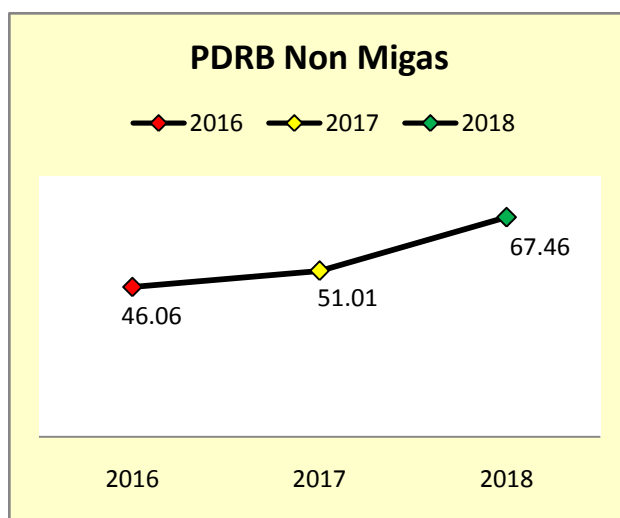
13. PDRB perkapita



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan pada

tahun 2018 meningkat sebesar 5,98 juta rupiah yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan, stakeholder dan masyarakat telah mampu menggerakkan 9 sektor ekonomi yang meliputi Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Capaian PDRB per Kapita Tahun 2018 di Kota Balikpapan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun ke arah peningkatan yang positif artinya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

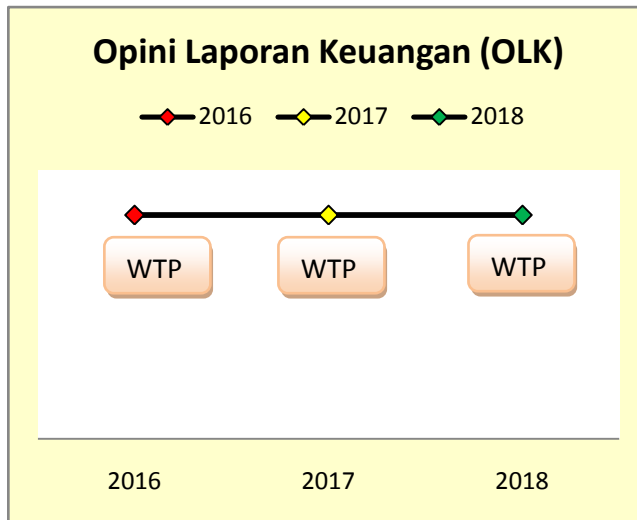
14. PDRB Non Migas



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU PDRB Non Migas Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 16,45 Triliun Rupiah yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa 9 sektor

ekonomi tanpa migas telah mengeliat dan berupaya meningkatkan produksi dan pendapatan pada tiap lini sub sektor ekonomi. Capaian PDRB Non Migas tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan pada Tahun 2018. Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah 5,2-5,4, bahwa capaian tersebut meningkat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 3,78.

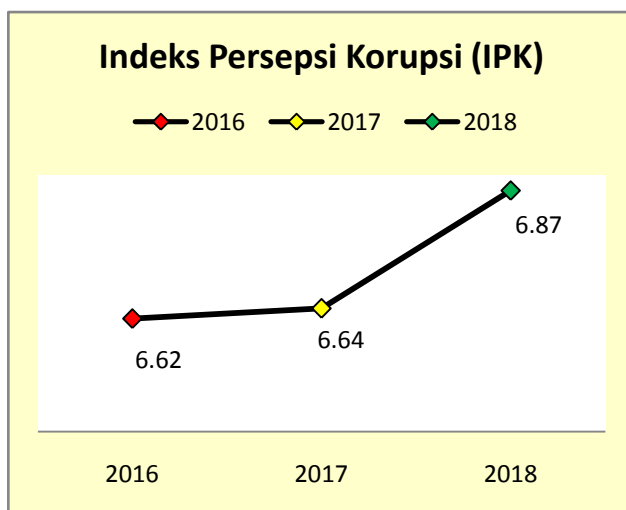
15. Opini Laporan Keuangan (OLK)



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Opini Laporan Keuangan (OLK) Kota Balikpapan pada tahun 2018 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan capaian IKU tahun 2017, dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dinilai wajar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Capaian terhadap Opini Laporan Keuangan (OLK) tersebut adalah kelima kalinya di peroleh Kota Balikpapan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Sejalan dengan capaian tersebut Pemerintah Kota terus memperbaiki tata kelola keuangan dengan meningkat metode pengelolaan keuangan menggunakan sistem aplikasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sistem aplikasi yang digunakan yaitu e-planning, SIPKD, SiMONEP, dan SiPEKa.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

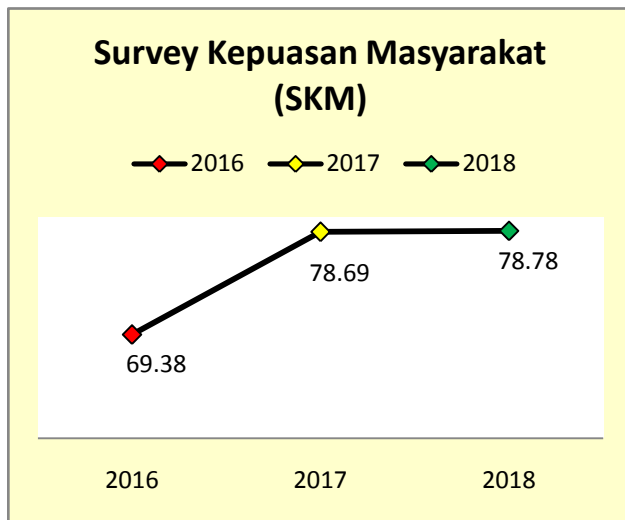


Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,23 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan capaian indikator tersebut menunjukkan

memberikan persepsi korupsi pada “Skala Sedang” atau dapat dikatakan adanya arah persepsi publik terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang menolak KKN

dimana rentang skala penilaian didasarkan atas skala 0 – 10, dimana jika IPK sama dengan 0 berarti sangat korup dan sebaliknya.

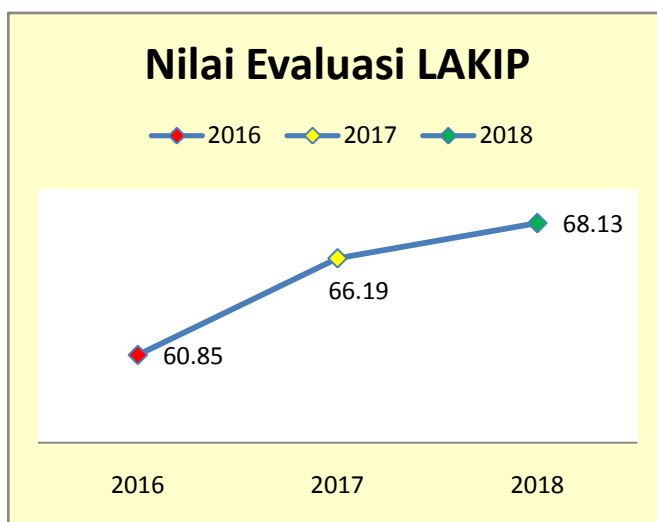
17. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Balikpapan Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,09 yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan capaian indikator memberikan gambaran

bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan layanan di tiap lini urusan pemerintah guna mewujudkan perangkat daerah yang professional dalam memberikan layanan bagi masyarakat, stakeholder dan setiap penduduk yang tinggal di Kota Balikpapan.

18. Nilai Evaluasi LAKIP

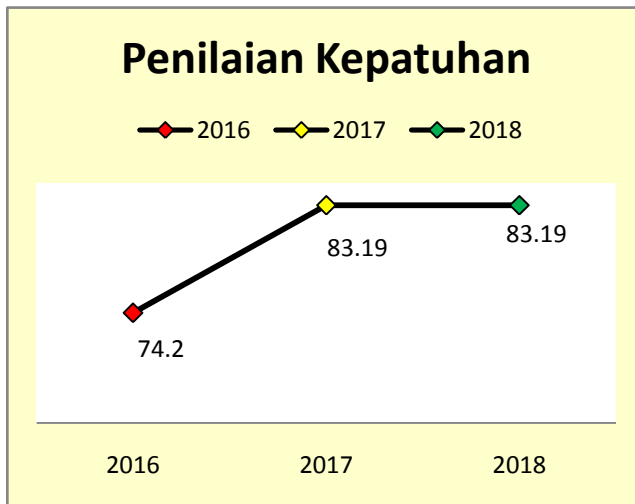


Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Balikpapan Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,94 poin yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Peningkatan capaian

indikator memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Balikpapan secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan sistem manajemen kinerja, sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu Pemerintah Kota Balikpapan berupaya melakukan

penyempurnaan sasaran dan *cascading* Indikator Kinerja Utama pada seluruh SKPD sampai dengan indikator kinerja di level Eselon III dan IV, sehingga tercipta keselarasan penjabaran (*cascade down*).

19. Penilaian Kepatuhan



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Penilaian Kepatuhan (SKM) Kota Balikpapan Kota Balikpapan pada tahun 2018 tidak terdapat perubahan hasil capaian dari tahun capaian indikator pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan Ombudsmen RI tidak melakukan Penilaian Kepatuhan pada Kota Balikpapan, sehingga

nilai capaian indikator pada tahun 2018 menggunakan capaian indikator tahun 2017. Berdasarkan capaian penilaian Ombudsmen RI, Nilai Kepatuhan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan berada pada Zonasi Pewarnaan Hijau, hal ini menyatakan bahwa secara rata-rata layanan yang diberikan bagi masyarakat telah mengikuti SOP layanan dan rendahnya pengaruh negatif (suap suap dalam proses layanan, gratifikasi, unsur nepotisme dsb) atas kepentingan aparatur dalam memberikan layanan.

20. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)



Pada grafik menunjukkan trend bahwa capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Kota Balikpapan Kota Balikpapan pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,85 poin yang merupakan hasil selisih dari perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan capaian indikator tahun 2017. Penurunan capaian dikarenakan

perhitungan capaian indikator yang awalnya menggunakan sepuluh sampel OPD, namun untuk mengukur IPASN pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan menggunakan jumlah seluruh OPD sebagai sampel untuk perhitungan IPASN. Adanya perubahan tersebut menurunkan capaian indikator dari 87,73 menjadi 59,19.

3.3. Pengukuran Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Terhadap Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016, Tahun 2017 terhadap capaian IKU 2018 selanjutnya, capaian IKU Tahun 2018 tersebut dilakukan perbandingan terhadap target akhir IKU pada RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui IKU apa saja yang telah tercapai atau melampaui target IKU yang diperjanjikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun tabel perbandingan antara capaian IKU 2018 terhadap target IKU RPJMD sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Realisasi IKU Tahun 2018 Terhadap Target IKU
RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Akhir IKU Tahun 2021	Realisasi IKU Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi IKU RPJMD Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2018	Capaian IKU Tahun 2018 Terhadap Target Akhir IKU RPJMD
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.53	10.58	100.47%	TERCAPAI
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	15.73	14.23	90.46%	BELUM TERCAPAI
3	Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74.04	73.98	99.92%	KURANG TERCAPAI
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.55	9.52	47.79%	BELUM TERCAPAI
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64.92	64.33	99.09%	BELUM TERCAPAI

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Akhir IKU Tahun 2021	Realisasi IKU Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi IKU RPJMD Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2018	Capaian IKU Tahun 2018 Terhadap Target Akhir IKU RPJMD
6	Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79.53	79.71	100.23%	TERCAPAI
7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2.3	2.64	87.12%	BELUM TERCAPAI
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	92	89.74	97.54%	BELUM TERCAPAI
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	60.46	59.55	98.49%	BELUM TERCAPAI
10	Livable City Index (LCI)	Angka Indeks	74.5	81.30	109.13%	TERCAPAI
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Angka Indeks	79	80.35	101.71%	TERCAPAI
12	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0.3	0.31	96.77%	BELUM TERCAPAI
13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Rp. (Juta)	126.64	142.35	112.41%	TERCAPAI
14	PDRB Non Migas	Rp. (Triliun)	38.62	67.46	174.68%	TERCAPAI
15	Opini laporan keuangan (OLK)	Kategori	WTP	WTP	100.00%	TERCAPAI
16	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai Kriteria	6.9	6.87	99.57%	BELUM TERCAPAI
17	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	80.36	78.78	98.03%	BELUM TERCAPAI
18	Nilai Evaluasi LAKIP (NEAKIP)	Predikat	75	68.13	90.84%	BELUM TERCAPAI
19	Penilaian Kepatuhan (ORI)	Angka Indeks	79	83.19	105.30%	TERCAPAI
20	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Angka Indeks	87	92.58	106.41%	TERCAPAI

Sumber : Hasil pengolahan data LKjIP, Bappeda Litbang 2018

Pada tabel 3.3 tersebut tergambar perbandingan antara capaian realisasi IKU Tahun 2018 terhadap target IKU RPJMD yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021. Uraian hasil perbandingan IKU sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU RLS tahun 2018 sebesar 10,58 Tahun melampaui target IKU RLS akhir tahun 2021 sebesar 10,53 Tahun, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 100,47%. Capaian RLS tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 0,47%.
2. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Harapan Lama Sekolah (HLS)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU HLS tahun 2018 sebesar 14,23 Tahun kurang dari target IKU HLS akhir tahun 2021 sebesar 15,73 Tahun, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 90,46%. Capaian HLS tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 9,54%.
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Angka Harapan Hidup (AHH)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU AHH tahun 2018 sebesar 73,98 Tahun kurang dari target IKU AHH akhir tahun 2021 sebesar 74,04 Tahun, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 99,92%. Capaian AHH tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 0,08%.
4. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU TPT tahun 2018 sebesar 9,52 persen kurang dari target IKU TPT akhir tahun 2021 sebesar 4,55 persen, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 47,79%. Capaian TPT tersebut menunjukkan bahwa sampai

dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 52,21%.

5. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU TPAK tahun 2018 sebesar 64,33 persen kurang dari target IKU TPAK akhir tahun 2021 sebesar 64,92 persen, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 99,09%. Capaian TPAK tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 0,91%.

6. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IPM tahun 2018 sebesar 79,91 melampaui target IKU IPM akhir tahun 2021 sebesar 79,53, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 100,23%. Capaian IPM tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 0,23%.

7. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Tingkat Kemiskinan (TKm)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU TKm tahun 2018 sebesar 2,64 persen kurang dari target IKU TKM akhir tahun 2021 sebesar 2,3 persen, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 87,12%. Capaian TKm tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 12,88%.

8. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IPG tahun 2018 sebesar 89,74 kurang dari target IKU IPG akhir tahun 2021 sebesar 92,00, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 97,54%. Capaian IPG tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 2,46%.

9. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IKLH tahun 2018 sebesar 59,58 kurang dari target IKU IKLH akhir tahun 2021 sebesar 60,46, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 98,54%. Capaian IKLH tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 1,46%.
10. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Livable City Index (LCI)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU LCI tahun 2018 sebesar 74,50 melampaui target IKU LCI akhir tahun 2021 sebesar 81,30, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 109,13%. Capaian LCI tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 9,13%.
11. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IKLID tahun 2018 sebesar 80,35 melampaui target IKU IKLID akhir tahun 2021 sebesar 79, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 101,71%. Capaian IKLID tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 1,71%.
12. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Gini Ratio (GR)
Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU GR tahun 2018 sebesar 0,31 kurang dari target IKU GR akhir tahun 2021 sebesar 0,30, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 96,77%. Capaian GR tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 3,23%.
13. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (PDRBKap)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU PDRBKAP tahun 2018 sebesar Rp. 142,35 juta melampaui target IKU PDRBKap akhir tahun 2021 sebesar Rp. 126,64 juta, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 112,41%. Capaian PDRBKap tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 12,41%.

14. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU PDRB Non Migas (PDRBNM)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU PDRBNM tahun 2018 sebesar Rp. 67,46 Triliun melampaui target IKU PDRBNM akhir tahun 2021 sebesar Rp. 38,62 Triliun, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 174,68%. Capaian PDRBNM tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 74,68%.

15. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Opini laporan keuangan (OLK)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU OLK tahun 2018 adalah WTP telah memenuhi target IKU OLK akhir tahun 2021 adalah WTP, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 100%. Capaian OLK tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah memenuhi target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021.

16. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IPK tahun 2018 sebesar 6,87 kurang dari target IKU IPK akhir tahun 2021 sebesar 6,90, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 99,57%. Capaian IPK tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 0,43%.

17. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU SKM tahun 2018 sebesar 78,78 kurang dari target IKU SKM akhir tahun 2021 sebesar 80,36,

dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 98,03%. Capaian SKM tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 1,97%.

18. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Nilai Evaluasi LAKIP (NEAKIP)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU NEAKIP tahun 2018 sebesar 68,13 kurang dari target IKU NEAKIP akhir tahun 2021 sebesar 75, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 90,84%. Capaian NEAKIP tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kurang dari target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 9,16%.

19. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Penilaian Kepatuhan (PK)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU PK tahun 2018 sebesar 83,19 melampaui target IKU PK akhir tahun 2021 sebesar 79, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 105,30%. Capaian PK tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 5,30%.

20. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD Tahun 2021 pada IKU Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Hasil perbandingan menggambarkan bahwa capaian realisasi IKU IPASN tahun 2018 sebesar 92,58 melampaui target IKU IPASN akhir tahun 2021 sebesar 79, dan tingkat capaian realisasi IKU RPJMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2018 adalah 106,41%. Capaian IPASN tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 telah melampaui target IKU yang diperjanjikan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 6,41%.

Berdasarkan hasil perbandingan antara capaian realisasi IKU Tahun 2018 terhadap target IKU RPJMD Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa IKU yang telah tercapai terhadap target RPJMD yaitu :

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
2. Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

3. Livable City Index (LCI)
4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
6. PDRB Non Migas (PDRBNM)
7. Opini laporan keuangan (OLK)
8. Penilaian Kepatuhan (ORI)
9. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Sedangkan IKU yang telah tercapai terhadap target RPJMD yaitu :

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
2. Usia Harapan Hidup (AHH)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
5. Tingkat Kemiskinan (TKm)
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8. Indeks Gini Ratio (GR)
9. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
10. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
11. Nilai Evaluasi LAKIP

3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2018 terhadap Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Nasional, Provinsi dan Kota Kalimantan Timur

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dan Tahun 2018 pada 20 indikator yang diperjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada sub bab ini capaian dari Indikator Kinerja Utama tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja utama nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan 2 (dua) Kota di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang terkait dengan 20 Indikator yang diperjanjikan. Adapun perbandingan capaian menurut indikator sebagai berikut.

1. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,55 tahun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,36 tahun, Kota Samarinda sebesar 10,34 tahun, Kota Bontang sebesar 10,70 dan capaian Nasional sebesar 7,56 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator RLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Nasional serta lebih rendah dari capaian Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator RLS terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,13, terhadap Kota Samarinda capaian rasio sebesar 1,02, terhadap Kota Bontang capaian rasio sebesar 0,99 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,40.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 10,58* tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk RLS Nasional.

2. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU HLS Kota Balikpapan dengan HLS Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator HLS Kota Balikpapan mencapai 13,75 tahun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,67 tahun, Kota Samarinda sebesar 14,64 tahun, Kota Bontang sebesar 12,88 tahun dan capaian Nasional sebesar 12,93 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator HLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang dan Nasional serta

lebih rendah dari capaian Kota Samarinda. Nilai Rasio perbandingan Indikator HLS terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,02, Kota Samarinda sebesar 0,94, Kota Bontang sebesar 1,07 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,06.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU HLS Kota Balikpapan dengan HLS Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 14,23* tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk HLS Nasional.

3. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,97 tahun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 73,70 tahun, Kota Samarinda sebesar 73,71, Kota Bontang sebesar 73,72 tahun dan capaian Nasional sebesar 71,11 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator AHH di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator AHH terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,00, Kota Samarinda sebesar 1,00, Kota Bontang sebesar 1,00 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,04.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 73,98* tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber

terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk AHH Nasional.

4. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 10,39% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,91% dan capaian Nasional sebesar 5,50%. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,53 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,92.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 9,52% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,60% dan capaian Nasional sebesar 5,34%. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT terhadap Provinsi kaltim capaian rasio sebesar 1,44 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,78.

5. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPTK)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 63,38% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 63,75% dan capaian Nasional sebesar 66,67%. Artinya realisasi capaian Indikator TPTK di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Nilai Rasio

perbandingan Indikator TPTK terhadap Provinsi kaltim capaian rasio sebesar 0,17 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,16.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 64,33% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 64,99% dan capaian Nasional sebesar 67,26%. Artinya realisasi capaian Indikator TPTK di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPTK terhadap Provinsi kaltim capaian rasio sebesar 0,15 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,14.

6. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 79,01 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,12, capaian Kota Samarinda 79,46, capaian Kota Bontang 79,47 dan capaian Nasional sebesar 70,81. Artinya realisasi capaian Indikator IPM di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dan lebih rendah dari capaian Kota Samarinda dan kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPM terhadap Provinsi kaltim capaian rasio sebesar 0,17, terhadap Samarinda sebesar 0,99, terhadap Kota Bontang sebesar 0,99 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 1,12.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 79,71* sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini

BPS Pusat maupun Kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPM Nasional.

7. Indikator Tingkat Kemiskinan (TKm)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,82% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,19%, capaian Kota Samarinda 4,77%, capaian Kota Bontang 5,16% dan capaian Nasional sebesar 10,12%. Artinya realisasi capaian Indikator TKm di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TKm terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 0,46, terhadap Samarinda sebesar 0,59, terhadap Kota Bontang sebesar 0,55 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,46.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,64% sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,03%, capaian Kota Samarinda 4,59%, capaian Kota Bontang 4,67% dan capaian Nasional sebesar 9,82% (per maret 2018). Artinya realisasi capaian Indikator TKm di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TKm terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 0,44, terhadap Samarinda sebesar 0,58, terhadap Kota Bontang sebesar 0,57 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,44.

8. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 89,74 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,62, capaian Kota Samarinda 89,26, capaian Kota Bontang 86,44 dan capaian Nasional sebesar 90,96. Artinya realisasi capaian Indikator IPG di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang dan capaian IPG lebih rendah dari capaian IPG Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPG terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,05, terhadap Samarinda sebesar 1,01, terhadap Kota Bontang sebesar 1,04 dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,99.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 91,46* sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG Nasional.

9. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 61,25 (Cukup Baik) sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,65 (Baik), dan capaian Nasional sebesar 66,46 (Cukup Baik). Artinya realisasi capaian Indikator IKLH di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, dan IKLH Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator IKLH terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 0,81, dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 0,92.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 59,58 (Kurang Baik) sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat dan daerah serta Kementerian Lingkungan Hidup merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLH Nasional.

10. Indikator *Livable City Index* (LCI)

a. **Perbandingan Realisasi capaian IKU LCI Kota Balikpapan dengan LCI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017**

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator LCI Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 80,81, sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 56,90. Artinya realisasi capaian Indikator LCI di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Samarinda. Nilai Rasio perbandingan Indikator LCI Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 1,42.

b. **Perbandingan Realisasi capaian IKU LCI Kota Balikpapan dengan LCI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018**

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator LCI Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 81,30, sedangkan capaian Provinsi Kaltim dan Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun kota merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG Nasional.

11. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)

a. **Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLI Kota Balikpapan dengan IKLI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017**

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator IKLI Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 78,10, sedangkan capaian untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLI.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLI Kota Balikpapan dengan IKLI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator IKLI Kota Balikpapan pada tahun 2018 mencapai 80,35, sedangkan capaian untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLI.

12. Indikator Indeks Gini Ratio (GR)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLI Kota Balikpapan dengan IKLI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator GR Kota Balikpapan mencapai 0,320 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur untuk GR sebesar 0,340 (data September 2017, BPS), capaian Nasional sebesar 0,404 (data September 2017, BPS). Artinya realisasi capaian Indikator GR di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator GR terhadap capaian Provinsi Kaltim sebesar 0,94 dan rasio perbandingan capaian terhadap Nasional sebesar 0,79.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLI Kota Balikpapan dengan IKLI Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator GR Kota Balikpapan mencapai 0,310 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur untuk GR sebesar 0,347 (data September 2017, BPS), dan capaian Nasional sebesar 0,391 (data September 2017, BPS). Artinya realisasi capaian Indikator GR di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator GR terhadap capaian Provinsi Kaltim sebesar 0,89 dan rasio perbandingan capaian terhadap Nasional sebesar 0,79.

13. Indikator PDRB perkapita

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan mencapai 136,37 Juta sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 126,65 Juta, dan capaian Nasional sebesar 51,9 Juta. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur, dan PDRB Perkapita Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Perkapita terhadap Provinsi Kaltim capaian rasio sebesar 1,08, dan terhadap Nasional capaian rasio sebesar 2,63.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan mencapai 142,35 Juta sedangkan capaian Nasional sebesar 56 Juta. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian PDRB Perkapita Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Perkapita terhadap Nasional capaian rasio sebesar 2,54.

14. Indikator PDRB Non Migas

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Non Migas Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Non Migas Kota Balikpapan mencapai 51,01 Triliun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 483,88 Triliun. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Non Migas di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Non Migas mencapai 0,096.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Non Migas Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator PDRB Non Migas Kota Balikpapan mencapai 67,46 Triliun sedangkan capaian untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk PDRB Non Migas.

15. Indikator Opini Laporan Keuangan (OLK)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU OLK Kota Balikpapan dengan OLK Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator OLK Kota Balikpapan dengan predikat WTP sedangkan capaian OLK Provinsi Kalimantan Timur dengan predikat WTP, dan capaian Kota Samarinda dengan predikat WTP dan capaian Kota Bontang dengan predikat WTP. Artinya realisasi capaian Indikator OLK di Kota Balikpapan sama dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU OLK Kota Balikpapan dengan OLK Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Se Kalimantan Timur pada Tahun 2018

Capaian realisasi capaian untuk Indikator OLK Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah WTP (perkiraan sementara), untuk capaian OLK Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat informasi yang dipublikasikan.

16. Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU OLK Kota Balikpapan dengan Realisasi capaian OLK Nasional pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPK Kota Balikpapan dengan skala capaian (1-10) sebesar 6,64. Capaian tersebut memiliki arti bahwa IPK Kota Balikpapan dalam zona warna hijau muda

dengan predikat persepsi cenderung bersih sedangkan capaian Nasional adalah 37 menggunakan skala angka persepsi (1-100). Capaian IPK Indonesia masuk dalam zona warna merah muda dengan predikat persepsi cenderung kearah korupsi dan pencegahan korupis melambat.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU OLK Kota Balikpapan dengan Realisasi capaian OLK Nasional pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator IPK Kota Balikpapan dengan skala capaian (1-10) sebesar 6,87. Capaian tersebut memiliki arti bahwa IPK Kota Balikpapan dalam zona warna hijau muda dengan predikat persepsi cenderung bersih sedangkan capaian Nasional adalah 38 menggunakan skala angka persepsi (1-100). Capaian IPK Indonesia masuk dalam zona warna merah muda dengan predikat persepsi cenderung kearah korupsi dan pencegahan korupis melambat.

17. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

a. Perbandingan Realisasi capaian SKM Kota Balikpapan dengan SKM Provinsi Kalimantan Timur dan Kota pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator SKM Kota Balikpapan mencapai 78,69 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya untuk dibandingkan.

b. Perbandingan Realisasi capaian SKM Kota Balikpapan dengan SKM Provinsi Kalimantan Timur dan Kota pada Tahun 2018

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator SKM Kota Balikpapan mencapai 78,78 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya untuk dibandingkan.

18. Indikator Nilai Evaluasi Lakip

a. Perbandingan Realisasi capaian Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan dengan Nilai Evaluasi Lakip Provinsi Kalimantan Timur dan Kota pada Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan mencapai 66,19 (B) sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur adalah BB, capaian Kota Bontang adalah B, dan capaian Kota Samarinda adalah CC. Artinya realisasi capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip di Kota Balikpapan lebih tinggi dari Pemkot Bontang dan Samarinda dan lebih rendah dari Pemprov Kaltim.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan dengan Nilai Evaluasi Lakip Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016 dan Tahun 2018.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan mencapai 68,13 (B) sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur adalah BB, capaian Kota Bontang adalah B, dan capaian Kota Samarinda adalah B (60,93). Artinya realisasi capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip di Kota Balikpapan lebih tinggi dari Pemkot Bontang dan Samarinda dan lebih rendah dari Pemprov Kaltim.

19. Indikator Penilaian Kepatuhan

- a. Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Penilaian Kepatuhan Kota Balikpapan mencapai 83,19 (zona hijau) sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 75,54 (zona kuning). Artinya realisasi capaian Indikator Penilaian Kepatuhan di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Samarinda. Nilai Rasio perbandingan Indikator Penilaian Kepatuhan mencapai 1,10. Untuk perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018.
- b. Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator Penilaian Kepatuhan Kota Balikpapan mencapai 83,19 (zona hijau). Capaian nilai kepatuhan tersebut sama dikarenakan nilai kepatuhan di Kota Balikpapan telah masuk dalam zona hijau.

20. Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

- a. Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPASN Kota Balikpapan mencapai 87,73 dan sedangkan capaian untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di

daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPASN.

- b. Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2018, untuk capaian Indikator IPASN Kota Balikpapan mencapai 92,58 dan sedangkan capaian untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPASN.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang diukur atas realisasi terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2018. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sekaligus pencapaian target kinerja yang ada dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2018 (setelah perubahan), maka realisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	2.227.832.853.277,00	2.086.964.532.422,00	93,68%
Belanja	2.407.567.298.809,00	1.977.816.533.853,00	82,15%
Pembiayaan Penerimaan	198.234.445.532,00	0,00	0,00%
Pembiayaan Pengeluaran	18.500.000.000,00	17.359.333.478,00	93,83%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Secara umum, realisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2018, baik komponen pendapatan, komponen belanja, komponen pembiayaan penerimaan dan komponen pembiayaan pengeluaran sangat baik. Jika dilihat per komponen APBD, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan dibandingkan tahun 2017 sebesar 12,99 % atau sebesar Rp 289.532.109.965,00, belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan dibandingkan tahun 2017 sebesar 16,01% atau sebesar Rp. 385.548.879.989,00, penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan dibandingkan tahun 2017 sebesar 48,06% atau sebesar Rp.

95.665.764.024,00 dan komponen pembiayaan pengeluaran mengalami penurunan dengan dibandingkan tahu 2017 sebesar 1,95% atau sebesar Rp. 360.000.000,00.

Adapun rincian pendapatan daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 setelah perubahan (sebelum dilakukan audit oleh BPKRI) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	PAD	678.500.000.000,00	566.281.230.974,33	83,46%
2	Dana Perimbangan	1.035.431.481.277,00	1.096.230.492.809,00	105,80%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	513.901.372,00	424.452.808.639,00	82,59%
	JUMLAH	2.227.832.853.277,00	2.086.964.532.422,00	93,68%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel pendapatan di atas, jika dilihat pada komponen pendapatan asli daerah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 13,55% atau sebesar Rp. 91.924.716.214,00, dana perimbangan tahun 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 10,86 % atau sebesar Rp. 112.471.879.751,00 sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sekitar 13,06 % atau sebesar Rp. 67.127.514.000. Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan, maka pendapatan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 12,99 %.

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan

Tahun 2016-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00
2014	638.630.681.123,00	729.037.647.063,32	2.474.995.562.245,32
2015	539.892.356.090,00	582.744.865.141,84	2.529.001.945.784,00
2016	555.970.991.413,00	560.364.263.457,29	1.993.392.160.506,29
2017	568.575.283.786,00	612.300.113.260,09	1.808.970.163.703,09
2018	678.500.000.000,00	566.281.230.974,33	2.086.964.532.422,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Pendapatan asli daerah tahun 2018 peningkatan terhadap tahun 2017, bahkan relatif naik sebesar 13,55%, namun pendapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 karena dipengaruhi oleh meningkatnya dana perimbangan sebesar 16,01% dan penerimaan pembiayaan sebesar 48,26%.

Realisasi perkembangan dana perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2016-2021

Tahun	Perimbangan	Pendapatan	Proporsi Terhadap Pendapatan
2012	1.074.521.018.050,00	1.647.132.469.666,19	134.0%
2013	1.173.881.648.321,00	2.214.991.437.841,00	109.3%
2014	2.635.068.224.864,00	2,474,995,562,245.32	106,47%
2015	1.430.910.142.069,00	2.233.750.843.885,84	88.33%
2016	1.066.561.649.134,00	1.993.392.160.506,29	53,51%
2017	922.960.601.526.00	1.808.970.163.703,09	51,02%
2018	1.096.230.492.809,00	2.086.964.532.422,00	52,53%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berikut adalah target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	835.621.007.000,00	801.071.613.902,85	95,87
Belanja Langsung	1571946291809,00	1.176.744.919.950	74,86
TOTAL	2.407.567.298.809,00	1.977.816.533.853,00	82,15

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi perkembangan Belanja Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Tahun	Belanja Tidak Langsung	(%)	Belanja Langsung	(%)
2012	636.400.738.757,38	95.4	1.035.447.137.559,59	89.5
2013	734.517.519.834,65	88.4	1.686.329.924.246,29	72.2
2014	783.390.898.940,53	91.6	1.716.199.878.941,62	74.1
2015	990.651.523.663,37	91.89	1.916.938.797.113,18	81.45
2016	852.431.100.615,53	92,05	1.263.300.175.173,30	82,38
2017	703,701,722,888.00	91,56	1,318,316,701,932.00	79,78
2018	835.621.007.000,00	95,87	1.571.946.291.809,00	74,86

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Jika dilihat pada tabel di atas, maka komponen belanja langsung tidak langsung tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 dan belanja langsung tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Hal ini cukup berpengaruh terhadap capaian target kinerja tahun 2018 yang sudah dijelaskan pada sub bab capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan di atas.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2018, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 39 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
1	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Inspektorat	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
2	Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kominfo	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
3	Panji Keberhasilan Bidang Industri	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
4	Panji Keberhasilan Bidang Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perdagangan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
5	Panji Keberhasilan Bidang Koperasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
6	Panji Keberhasilan Bidang Dekranasda	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
7	Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
8	Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
9	Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perhubungan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
10	Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
11	Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
12	Panji Keberhasilan Bidang Kesehatan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas kesehatan kota	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
13	Panji Keberhasilan Bidang Tata Kelola Kearsipan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arisp dan perpustakaan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
14	Panji Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
15	Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
16	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas lingkungan hidup	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
17	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
18	Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
19	Terbaik II Bidang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
20	Terbaik II Bidang Pembangunan Hukum dan HAM	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Hukum	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
21	Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	BNN Kota	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
22	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kominfo	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
23	Terbaik II Bidang Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
24	Terbaik II Bidang Apresiasi Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
25	Terbaik II Bidang Perpustakaan dan Minat Baca	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arsip & perpustakaan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
26	Terbaik II Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Organisasi	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
27	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pertanahan dan penataan ruang	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
28	Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
29	Terbaik III Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pemuda olahraga dan pariwisata	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
30	Terbaik III Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Sosial	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
31	Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
32	Terbaik III Bidang Prestasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
33	Terbaik III Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Tenaga Kerja	HUT Ke-61 PROV KALTIM	WALIKOTA
34	Peringkat I Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Prov. Kaltim	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Kelurahan Baru Ilir	HUT Ke-61 PROV KALTIM	Lurah
35	Peringkat III Lomba Camat Berprestasi Tingkat Prov. Kaltim	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Kecamatan Balikpapan Timur	HUT Ke-61 PROV KALTIM	Camat Bpp Timur
36	Pembina Pelayanan Publik Terbaik 2017	Nasional	Kemenpan & RB	Walikota	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017	Wawali
37	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2017	Nasional	Kemenpan & RB	Disdukcapil	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017	Ka. Disdukcapil
38	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2017	Nasional	Kemenpan & RB	RSUD Balikpapan	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017	Dir. RSUD Balikpapan
39	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2017	Nasional	Kemenpan & RB	DPMPT	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2017	Ka. DPMPT
40	Penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) Hijau	Provinsi	Pemprov Kaltim	RSUD Balikpapan	Peringatan hari Lingkungan Hidup se-Dunia Prov Kaltim	Dir RSUD
41	Adiwiyata Provinsi Kaltim	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disdik	Peringatan hari Lingkungan Hidup se-Dunia Prov Kaltim	51 Kepsek

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
42	BKN Award 2018 atas Pengelolaan Kepegawaian Terbaik kategori Kab/Kota Tipe A	Nasional	BKN	BPKSDM		Ka. BKPSDM
43	Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards (Yowita) 2018 kategori kota Terbaik di Provinsi Kaltim dan kategori 10 Besar Kota Terbaik Nasional	Nasional	Kemenpar RI	Dirporapar		WALIKOTA
44	Penganugerahan Menuju KLA Strata MADYA	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AKB	Peringatan Hari Anak Nasional	WALIKOTA
45	Penghargaan Pengembangan Forum Anak Terbaik	Nasional		DP3AKB	Peringatan Hari Anak Nasional	WALIKOTA
46	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak Terbaik Jenjang SD	Nasional		DP3AKB	Peringatan Hari Anak Nasional	WALIKOTA
47	Pembina Pelayanan Publik Terbaik 2018	Nasional	Kemenpan & RB	Walikota	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2018	Wawali
48	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2018	Nasional	Kemenpan & RB	Disdukcapil	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2018	Ka. Disdukcapil
49	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2018	Nasional	Kemenpan & RB	RSUD Balikpapan	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2018	Dir. RSUD Balikpapan
50	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2018	Nasional	Kemenpan & RB	DPMPT	Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2018	Ka. DPMPT
51	Pakarti Utama II Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK	Nasional	TP PKK Pusat / Kemendagri	PKK Kel Ma. Rapak	Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44 dan Jambore Nasional Kader PKK	Ka. TP PKK Balikpapan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
52	Terbaik I INAGARA (Inovasi Administrasi Negara)	Regional	LAN RI	RSUD Beriman	Jambore Inovasi Kalimantan	Dir. RSUD Balikpapan
53	Anugrah Ki Hajar Katagori MADYA	Nasional	Kemendikbud	Disdikbud	ANUGERAH KI HAJAR 2018	WALIKOTA
54	Piagam Penghargaan Pemerintah RI atas Opini WTP terhadap LKPD TA. 2017	Nasional	Kemenkeu RI	BPKD	Penyerahan Penghargaan Oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Prov. Kaltim	Walikota
55	Smart Sanitation Award 2018	Nasional	Kemenkes & AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi)	DKK	CSS XVIII	Asisten II
56	Natamukti	Nasional	International Council for Small Business (ICBS) & Kemenkop & UKM	DKUMKMP	ICBS Indonesia City Award	WALIKOTA
57	Penghargaan Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	Nasional	Kemenpan & RB	RSUD Beriman	Penyampaian Hasil Evaluasi dan Apresiasi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2018	Asisten II
58	Penghargaan Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	Nasional	Kemenpan & RB	DPMPT		Asisten II
59	Penghargaan Unit Pelayanan Publik Kategori B	Nasional	Kemenpan & RB	Disdukcapil		Asisten II
60	Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kaltim 2018	Provinsi	Komisi Informasi Kaltim	Diskominfo		
61	Peringkat 2 Kategori Waste to Energy	Nasional	KemenPUPR	Bappeda	Malam Penghargaan PUPR 2018	Sekretaris Bappeda
62	Peringkat II Pemenang Website Awards 2018, Kategori BUMD/PERUSDA Kalimantan Timur	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	PDAM	Anugerah Badan Publik Website Awards 2018	Direktur Umum
63	Peringkat 3 Website Awards 2018	Provinsi		Set. DPRD		Sekretaris DPRD

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
64	Website Awards 2018 Kategori inovasi dan kreativitas pengelolaan website	Provinsi		DPPR		Ka. DPPR
65	Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2018 Pemenang Pilar Manajemen Keselamatan Jalan Kategori Excellent City	Nasional	Bappenas	Dishub	Penganugerahan Indonesia Road Safety Award 2018	Ka. Dishub
66	Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	Nasional	Kemenpan & RB	RSKB Sayang Ibu	Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	Wawali
67	Kota Peduli HAM	Nasional	Kemenkum & HAM	Bag. Hukum	Pperingatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-70,	Kabag Hukum

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Tingkat Rata-rata Capaian (%)	Capaian IKU Terhadap Sasaran Strategis	Hasil
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	101.60%	Melampaui target	Tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	100.01%	Melampaui target	Tercapai
3	Menurunnya jumlah pengangguran	78.35%	Kurang dari Target	Tidak Tercapai

4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	96.04%	Kurang dari Target	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100.13%	Melampaui target	Tercapai
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	111.37%	Melampaui target	Tercapai
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	105.72%	Melampaui target	Tercapai
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	102.88%	Melampaui target	Tercapai
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	100.00%	Sesuai Target	Tercapai
10	Tata kelola pemerintahan yang baik	106.62%	Melampaui target	Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 10 sasaran strategis beserta indikatornya, pencapaian sasaran strategis atas capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 secara keseluruhan tercapai dengan realisasi sebesar 80% tercapai dan 20% kurang tercapai dari 20 IKU yang diperjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan.

Sehubungan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 menunjukkan kategori sangat baik di 15 indikator dengan capaian kinerja sesuai dengan target dan melampaui dari target, akan tetapi terdapat 5 indikator kinerja yang masih perlu perhatian dan upaya dan tindaklanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk ditingkatkan, yakni :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Kemiskinan
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
5. Survey Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 22 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN

H. M. RIZAL EFFENDI



**PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,49
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,73
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	UsiaHarapanHidup (tahun)	73,99
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,05%
		2.	AngkaPartisipasi AngkatanKerja (%)	64,09
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,13
		2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,32
		3.	Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,82
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i>	73,50
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	77
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0,32
		2.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	151,15
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	48,65
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2.	Indeks Persepsi Korupsi	6,75
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	79,76
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	71,00 (BB)
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	83,19
		6.	Indeks Profesionalitas ASN	85

Balikpapan, 22 Januari 2019





**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2019**

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	10,610,567,500	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	8,346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	680,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9,684,886,900	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,786,626,000	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,306,171,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,864,250,000	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	34,559,915,000	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	45,028,273,400	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	889,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	22,863,748,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
				Perindustrian
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	53,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	71,500,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,142,567,500	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	55,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	105,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	68,683,374,500	Dinas Lingkungan Hidup
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,442,974,390	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,523,700,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,348,194,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	393,500,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,519,090,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	12,821,375,500	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	9,787,505,000	Dinas Pekerjaan Umum
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	41,188,125,000	Dinas Pekerjaan Umum
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	27,261,011,000	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	27,422,083,250	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	39,212,950,000	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	123,245,960,000	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,392,363,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,598,686,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	556,203,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	214,097,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	7,516,085,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,605,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,319,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	100,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,480,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,615,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	18,252,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,752,040,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,936,124,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	194,655,494,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,303,102,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,326,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,532,552,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	287,500,000	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	4,894,925,700	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	11,625,959,000	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	912,500,000	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	34,000,000,000	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	500,000,000	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	335,000,000	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	237,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,180,168,700	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	540,775,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5,517,576,250	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	220,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	300,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,777,961,700	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	825,000,000	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	9,061,724,100	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	177,949,000	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	717,712,500	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	189,933,500	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	908,736,000	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3,099,100,000	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	146,436,500	Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	616,097,000	Sekretariat Daerah
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,780,500,000	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300,000,000	Sekretariat Daerah
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	9,253,001,804	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	500,000,000	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			890,122,503,094	
II PROGRAM PENUNJANG				
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	506,264,400	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	400,000,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	123,710,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	269,097,500	Badan Pengelola Keuangan Daerah
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	3,378,125,000	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	387,300,000	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	220,000,000	Dinas Kesehatan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	887,805,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,646,665,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3,778,885,900	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	125,000,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	19,854,600,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	980,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	500,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	520,473,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,082,049,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	847,600,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	1,367,281,000	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	22,920,800,000	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	574,600,000	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	81,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	4,387,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,750,049,200	Dinas Perdagangan
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6,940,756,500	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	660,000,000	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,000,000	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17,685,015,000	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	4,500,000,000	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	200,000,000	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	866,486,000	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	100,340,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	700,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	618,760,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	123,900,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,715	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	64,218,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,007,339,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	385,796,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	547,300,000	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	653,500,000	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	596,007,500	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,136,290,000	Inspektorat
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,583,824,000	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,131,601,000	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	645,935,000	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	18,124,046,300	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	112,875,953,700	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	265,000,000	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21,179,494,000	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,450,973,000	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	986,640,000	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	72,871,450	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	204,095,400	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	84,789,825,000	Sekretariat Daerah
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,028,050,000	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,951,993,300	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	16,000,000,000	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,187,301,500	Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	50,000,000	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5,792,146,700	Sekretariat Daerah
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,153,000,000	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	19,834,209,650	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	377,840,000	Sekretariat Daerah
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,086,997,200	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	330,000,000	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	2,608,500,000	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50,000,000	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	150,000,000	Sekretariat Daerah
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	400,000,000	Sekretariat Daerah
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,209,888,300	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	607,000,000	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,250,000,000	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	68,320,000	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	338,500,000	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	230,000,000	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133,679,572,750	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	495,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	200,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500	Seluruh OPD Kota Balikpapan
JUMLAH II			658,180,387,165	
JUMLAH I + JUMLAH II			1,548,302,890,259	

Balikpapan, 22 Januari 2019





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 20 Februari 2018



WALI KOTA BALIKPAPAN

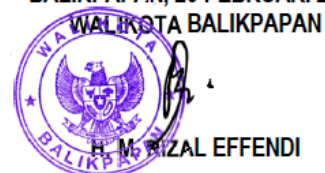
H. M. RIZAL EFFENDI

PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,47
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun	13.93
2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan	1. Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	73.97
3.	Menurunnya Jumlah Pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5.30%
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Angka)	63.68
4.	Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan	1. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	78.73
		2. Tingkat Kemiskinan (TKm) (%)	2.33
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91
5.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	59,50
6.	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan	1. Livable City Index (LCI) (Indeks)	73
7.	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)	76.00
8.	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Indeks Gini Ratio (GR) (Indeks)	0,33
		2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Juta (Rp)	Rp143,33(Juta)
9.	Mendorong Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	1. PDRB Non Migas Trilyun (Rp)	Rp 67.46 (Triliun)
10.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Opini laporan keuangan (Opini)	WTP
		2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (Indeks)	6.70
		3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	79,76
		4. Nilai Evaluasi LAKIP (Angka)	B(69-71)
		5. Penilaian Kepatuhan (Angka)	65
		6. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	84

BALIKPAPAN, 20 FEBRUARI 2018



No	Kode Program	Nama Program	Anggaran
1	1.01.06.1.01.06.01.23.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	115,000,000
2	1.02.05.1.02.05.01.16.022	Pemantapan Program Adiwiyata	98,500,000
3	1.01.02.1.01.02.00.35.	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	5,651,963,000
4	1.01.06.1.01.06.01.22.002	Pengelolaan Data Pmks Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	1,013,975,800
5	1.01.03.1.01.03.01.36.	Peningkatan Drainase Lingkungan	18,051,485,000
6	1.01.03.1.01.03.01.35.	Peningkatan Jalan Lingkungan	70,605,621,000
7	1.01.02.1.01.02.00.33.002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	148,480,000
8	1.02.10.1.02.10.10.19.	Penyebarluasan Informasi Daerah	917,000,000
9	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	866,672,400
10	1.02.05.1.02.05.01.16.027	Program CGH (Clean, Green and Healthy City)	198,500,000
11	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	146,895,000
12	1.01.03.4.00.01.01.69.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	354,945,000
13	1.01.02.6.00.01.01.37.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	264,025,000
14	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	2,800,000,000
15	1.02.08.1.02.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	2,820,066,350
16	5.00.01.5.00.01.01.23.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	170,000,000
17	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	440,000,000
18	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	814,023,000
19	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	516,450,000
20	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	14,887,200,000
21	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	6,935,102,500
22	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134,444,325,300
23	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	330,000,000
24	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1,577,914,650
25	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	141,200,000
26	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,073,790,000
27	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	50,550,000,000
28	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	10,000,000,000
29	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	36,400,350,000
30	1.02.09.1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	400,000,000
31	2.00.01.2.00.03.01.33.	Program Pembangunan/Peningkatan/Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	6,000,000,000
32	1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	488,416,000
33	2.00.03.2.00.03.01.32.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	242,100,000
34	5.00.01.1.01.05.02.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2,476,200,000
35	2.00.03.2.00.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	411,496,000

36	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	11,759,522,250
37	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	105,000,000
38	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,402,140,000
39	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	100,000,000
40	1.02.08.6.00.01.06.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	247,000,000
41	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,502,500,000
42	5.00.01.1.01.05.02.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,855,120,000
43	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	70,000,000
44	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	13,677,910,000
45	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	950,000,000
46	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	423,000,000
47	1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1,331,225,800
48	1.01.04.1.01.04.01.29.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1,528,000,000
49	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,145,821,600
50	4.00.01.4.00.01.01.42.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	181,500,000

No	Kode Program	Nama Program	Anggaran
51	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	611,725,000
52	1.02.04.1.01.01.01.16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	20,630,802,650
53	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,192,160,000
54	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	12,724,000,000
55	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,808,828,000
56	2.00.03.2.00.03.01.28.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	395,020,000
57	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	50,000,000
58	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,023,000,000
59	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	178,529,195,900
60	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	11,835,550,000
61	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,235,000,000
62	3.00.02.3.00.02.01.29.	Program Penelitian dan Pengembangan	785,000,000
63	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	53,199,900,000
64	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	4,000,000,000
65	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	36,364,989,500
66	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	28,000,000,000
67	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	475,000,000
68	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	280,000,000
69	1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Pengawasan Pengendalian Investasi dan Perizinan	36,185,000
70	1.01.04.1.01.04.01.20.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	6,287,185,000
71	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,653,181,900
72	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4,995,000,000
73	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	650,000,000
74	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	3,457,648,000
75	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	90,000,000
76	1.02.05.1.01.04.01.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,612,815,000
77	1.02.08.1.02.02.01.22.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Perlindungan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	556,203,000
78	1.01.01.1.02.17.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,030,494,000
79	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	200,000,000
80	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	65,000,000
81	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2,753,000,000
82	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	1,711,260,000
83	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9,000,000,000
84	2.00.07.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	655,925,000
85	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	100,000,000
86	2.00.01.2.00.03.01.36.	Program Pengembangan Kemitraan Usaha	15,000,000
87	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	12,028,000,000
88	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	43,175,888,000
89	1.02.10.1.02.10.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	649,768,000
90	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,560,485,500
91	2.00.01.2.00.03.01.34.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	69,300,000
92	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,070,250,000
93	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	4,650,000,000
94	2.00.06.2.00.06.01.25.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	371,997,000
95	1.02.08.1.02.02.01.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	214,097,500
96	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	578,700,000
97	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1,103,500,000
98	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	70,000,000
99	4.00.01.4.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,095,185,000
100	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program Pengendalian Banjir	16,068,800,000
101	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	295,915,000
102	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	599,000,000
103	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,311,200,000
104	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	889,200,000

No	Kode Program	Nama Program	Anggaran
105	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	4,898,000,000
106	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	137,900,000
107	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12,793,222,700
108	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4,590,465,000
109	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	968,566,000
110	2.00.03.2.00.03.01.31.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	218,100,000
111	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	178,900,000
112	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	111,000,000
113	3.00.04.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	220,000,000
114	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	145,000,000
115	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	19,132,670,000
116	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	210,780,000
117	3.00.04.3.00.04.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	768,157,000
118	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17,700,000
119	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	4,682,935,000
120	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	850,000,000
121	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	775,131,200
122	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	5,697,199,400
123	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	131,612,000
124	1.01.04.1.01.05.01.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	210,000,000
125	3.00.04.3.00.04.01.24.	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	25,000,000
126	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	383,500,000
127	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	696,905,000
128	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100,000,000
129	3.00.04.3.00.04.01.22.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara	9,415,515,150
130	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	162,247,350
131	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	69,871,572,000
132	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,032,120,000
133	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Kesehatan	33,423,539,000
134	1.01.01.1.01.01.01.32.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik Serta Tenaga Kependidikan	60,000,000
135	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	2,008,936,000
136	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	726,000,000
137	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	793,188,000
138	1.02.09.1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	292,000,000
139	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	15,045,000,000
140	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	782,550,000
141	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	7,036,501,200
142	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	480,655,000
143	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	17,926,062,000
144	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,895,555,000
145	2.00.03.2.00.03.01.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	48,650,000
146	2.00.01.2.00.03.01.25.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,616,645,000
147	2.00.03.2.00.03.01.30.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	249,200,000
148	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,376,038,600
149	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	432,314,000
150	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177,709,508,950
151	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	25,000,000,000
152	1.02.13.2.00.02.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1,545,238,000
153	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	4,460,000,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Kode Program	Nama Program	Anggaran
154	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	3,600,000,000
155	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	950,283,000
156	1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	100,000,000
157	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	52,750,000
158	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	369,000,000
159	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	212,500,000
160	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	339,998,800
161	3.00.02.3.00.02.01.27.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	454,964,000
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	917,102,400
163	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	385,000,000
164	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	318,560,000
165	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	7,563,381,600
166	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	624,000,000
167	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	180,537,500
168	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	6,302,000,000
169	1.01.04.1.01.05.01.28.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	165,350,000
170	1.01.03.1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	78,606,042,000
171	1.01.04.1.01.05.01.27.	Program Sarana dan Prasarana Logistik	3,958,900,000
172	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	150,000,000
173	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	36,406,045,750
174	1.02.08.1.02.02.01.15.014.	Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan	15,000,000
175	1.01.01.1.01.01.01.18.021.	Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	72,150,000

BALIKPAPAN, 20 FEBRUARI 2018

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-14/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator Kinerja Utama 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berisi sasaran strategis dan indikator utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya mengacu pada indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk:
a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
b. Indikator Kinerja Utama 5 (lima) tahun dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja setiap tahun dituangkan dalam dokumen yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan diketahui Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Kota Balikpapan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 NOMOR 188.45-14/2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Asumsi bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan tidak mengalami penurunan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.	$RLS = \frac{P_{25+}}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-}i)$ Keterangan : RLS = Rata-rata Lama Sekolah P ₂₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas Lama Sekolah Penduduk ke-i = terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD s.d. S1 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir 	BPS, Disitkubud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator/Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) diharapkan dicapai oleh anak di Balikpapan	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_a = FK \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Keterangan : HLS_a = Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah</p>	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengetahui derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHHmencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.	AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010	BPS, Dinkes, Disdukcapil	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3.	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan di Kota Balikpapan	Nilai Persentase (%) jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS, Distriker, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Mengetahui potensi angkatan kerja yang tersedia di Balikpapan	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun +}} \times 100\%$	BPS, Disnaker, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"> mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. 	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p>	$IPM = \sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{keselamatan} \times I_{pendapatan}}$ <p>Dimensi pembentuk IPM :</p> $I_{pendidikan} = \frac{RLS+HLE}{2}$ <p>$I_{keselamatan}$ = Nilai Rata-rata atas =</p> $I_{pendapatan}$ = Angka Harapan Hidup (AHH) $I_{pendapatan} = PDRB \text{ Perkapita}$	BPS, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DPPAKB
		2. Tingkat Kemiskinan (TKm)	Mengetahui proporsi penduduk miskin di Kota Balikpapan	Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	$TKm = \frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Disdukcapil	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Mengetahui tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketumpangan gender.	$IPG = \frac{1}{3} [(X_{ese(1)} + X_{ese(2)} + inc.dfs)]$ <p>Keterangan :</p> $X_{ese(1)}$ = Xede untuk harapan hidup $X_{ese(2)}$ = Xede untuk harapan pendidikan $Inc-dfs$ = indeks distribusi pendapatan	BPS, DPPAKB Disdukcapil	DPPAKB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu daerah, dimana Tujuan disusunnnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Keterangan : IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai IPU = Indeks Pencemaran Udara</p>	DLH, Bappeda Litbang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Livable City Index (LCI)	Mengetahui tingkat kenyamanan suatu kota berdasarkan persepsi warganya.	Kota layak huni atau <i>Livable City</i> adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep <i>livable city</i> digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya.	Metode pengukuran kualitas atas penilaian <i>Livable City Index (LCI)</i> oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia.	Bappeda Litbang	DPP, DPU, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator-Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah	Hasil pengujian diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10)	Bappeda Litbang	DPU, Dishub Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Gini Ratio (GR)	Mengetahui pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan Kota Balikpapan	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ketidakteraturan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.	$GR = 1 - \frac{\sum f_i [Y_i + Y_{i+1}]}{2 \sum Y_i}$ Keterangan : $\sum f_i$ = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas Ke - i Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. • Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. • Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. • Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bag. Perekonomian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Mengetahui nilai tambah produksi per penduduk Kota Balikpapan	Merupakan alat (<i>tool</i>) ukur kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (<i>quantitative change</i>) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita	$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Bappeda Litbang
9.	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas	Mengetahui nilai tambah produksi kota Balikpapan tanpa memperhitungkan sektor migas	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah tanpa sektor migas	$\text{PDRB Non Migas} = \frac{\text{PDRB} - \text{Migas}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas DPMPT, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan	Mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Keuangan merupakan pernyataan pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Tidak Wajar dan Tidak menyatakan pendapat	6	7	8
		2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Mengetahui persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i> atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks komposisi yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi.	Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan Skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Survei Kepuasan Masyarakat at (SKM)	Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan	Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.	Survei Kepuasan Masyarakat terukur atas Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan oleh Tim penyusunan indeks kepuasan masyarakat atau unit independen yang sudah berpengalaman, perlu dilakukan melalui "Perjanjian kerja sama" dengan unit independen seperti BPS, Perguruan Tinggi, LSM .Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).	Perangkat Daerah se Kota Balikpapan	Bappeda Litbang
		4. Nilai Evaluasi AKIP	Mengetahui penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan	Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik	Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan Skala Skoring: AA = 90 - 100 A = 80 - 90 BB = 70 - 80 B = 60 - 70 CC = 50 - 60 C = 30 - 50 D = 0 - 30	BPS, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi	Bappeda Litbang







Kegiatan Bimtek SILAKIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan







PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



**MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN**

TAHUN 2018





VISI RPJMD TAHUN 2011-2016
MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI
MENUJU MADINATUL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2016